

DIPA FAKULTAS

LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN NERACA PENATAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**



Oleh:

Armijon, S.T.,M.T.

NIP. 197304102008011008

Ir. Setyanto. M.T

NIP. 195508301984031001

Ir. Margareta Welly, M.T

NIP. 195504021990032001

Dibiaya Oleh DIPA Fakultas Unila Tahun 2017

**PRODI D3 TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kajian Neraca Penatagunaan Lahan Kabupaten Pringsewu
2. Bidang Penelitian : Rekayasa
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Armijon, ST., MT.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197304102008011008
 - d. Disiplin Ilmu : Teknik Geodesi
 - e. Golongan : Penata Muda IIIb
 - f. Jabatan Asisten Ahli : Asisten Ahli
 - g. Jabatan Struktural : Koordinator Program Studi
 - h. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
 - i. Alamat : Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng
Bandar Lampung, Lampung Kode Pos 35145
 - j. Telepon/Faks/E-mail : (0721) 703688 / armijon.1973@eng.unila.ac.id
 - k. Alamat Rumah : Jl. Samratulangi GG. Teratai No 16
Gedong Air Tanjung Karang Barat 35151
 - l. Hp/E-mail : 081273360000/ armijon@gmail.com
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (Dua) Orang
5. Anggota Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Jurusan	PT
1	Ir. Setyanto, MT	Teknik Sipil	S1 Teknik Geodesi	Unila
2	Margareta	Teknik Sipil	D3 Teknik TSP	Unila
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pringsewu
7. Jumlah Pendanaan : Rp 7.500.000,-
8. Sumber Pendanaan : Dipa Fakultas Unila TA 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Gatot Eko Susilo, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP 197009151995031006

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila

Warsono, Ph.D.
NIP : 19302161987031003

Bandar Lampung, 8 November 2017

Ketua Peneliti,

Armijon, S.T., M.T
NIP 197304102008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Prof. Drs. Suharno, M.Sc, Ph.D.
NIP : 196207171987031002

ABSTRAK

Terpisahnya Pringsewu dari Kabupaten Tanggamus tentu memberikan dampak yang positif, terutama bagi pembangunan fisik dan sosial masyarakatnya. Terlebih lagi, letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat, dimana merupakan salah satu jalur penghubung Provinsi Lampung menuju sejumlah Provinsi-Provinsi di pantai Barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa dan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan wilayah diprovinsi Lampung. Dinamika pembangunan wilayah dan rencana pengembangannya sebagai titik simpul kegiatan utama di kabupaten pringsewu memberi dampak positif dalam proses pembangunan wilayah. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten. Selain itu beberapa kawasan yang memiliki fungsi lindung terindikasi secara perlahan telah mengalami peralihan fungsi dan dimanfaatkan untuk kegiatan bukan lindung, akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Dalam kerangka pembangunan daerah, Neraca Penatagunaan Lahan Kabupaten merupakan data dan analisis perimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan neraca lahan kabupaten pringsewu diperlukan untuk memberikan data ketersediaan lahan bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan lahan

Analisis Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Pringsewu meliputi kegiatan-kegiatan inventarisasi dan pembaharuan data penggunaan lahan, yang terdiri dari data-data perubahan penggunaan lahan serta gambaran umum penguasaan lahan berdasarkan tinjauan dokumen RTRW serta pustaka-pustaka pendukung lainnya serta hasil survei lapangan. Selain itu dilakukan analisis Penanggunaan Lahan, memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis dan teknologi Penginderaan Jauh untuk menghasilkan Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan, Analisis Perubahan penggunaan Lahan, dan Analisis Ketersediaan Lahan

Hasil akhir dari penelitian ini berupa analisis neraca penggunaan lahan yang menginformasikan ketersediaan lahan berdasarkan kondisi penggunaan dan penguasaan lahan yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan dalam menentukan Arahan Kebijakan pengembangan wilayah dan dasar rujukan dalam memberikan perizinan perolehan lahan bagi pengembangan pembangunan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan matrik dasar kehidupan manusia dan pembangunan karena hampir semua aspek kehidupan dan pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan lahan (Saefulhakim dan Nasoetion, 1995a). Lahan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai sifat terbatas baik ketersediaan maupun kemampuannya. Ketersediaan Lahan dibatasi oleh luas permukaan yang tetap, sedangkan kemampuannya dibatasi oleh karakteristik lahan tersebut.

Akibat keterbatasan lahan, maka pengelolaan lahan menjadi sangat penting bagi manusia, pembangunan dan lingkungan hidup. Agar fungsi lahan berkelanjutan maka penggunaan lahan harus dilakukan secara terencana, sesuai dengan kemampuannya, optimal dan lestari. Penggunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik materil maupun spiritual (Arsyad, 1989). Penggunaan lahan ditentukan oleh beberapa factor seperti sifat fisik lahan, kondisi social, budaya dan ekonomi serta kebijakan pemerintah.

Permasalahan utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan pada saat ini adalah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya dan perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai menciptakan degradasi lahan. Masalah degradasi lahan dan kerusakan ekosistem, seperti erosi tanah, sedimentasi, banjir, tanah longsor, dan polusi merupakan masalah utama yang dihadapi di beberapa Negara pada saat ini. Pertambahan penduduk dan semakin tingginya intensitas pembangunan, akan terus meningkatkan kebutuhan terhadap lahan. Hal ini menyebabkan timbulnya kelangkaan lahan dan konflik penggunaan lahan, sehingga mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, khususnya terhadap sektor pertanian dan lingkungan hidup. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Selain itu perubahan penggunaan lahan dapat menimbulkan masalah sosial, karena adanya biaya eksternal akibat perubahan penggunaan lahan yang ditanggung oleh masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan, pada hakekatnya, adalah upaya mencari keseimbangan antara faktor daya dukung lahan dan faktor sosio-ekonomi masyarakat yang menggunakan lahan. Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan lahan, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penyeimbangan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, sehingga

penggunaan dan pemanfaatan lahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, namun tetap mencerminkan prinsip rasa keadilan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan hidup. Pemandu-serasian faktor – faktor tersebut akan selalu menjadi tantangan dalam mengambil keputusan – keputusan terkait dengan lahan.

Lahan adalah sumber utama kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dan karenanya lahan haruslah digunakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Perwujudan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang optimal tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang yang semestinya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana tata ruang merupakan rencana letak dari berbagai macam penggunaan dan pemanfaatan lahan direncanakan dalam rangka memenuhi berbagai ragam keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, banyak sekali jenis penggunaan dan pemanfaatan lahan yang harus diakomodir dalam rencana tata ruang. Karena itu, rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang diletakkan dalam rencana tata ruang hanya mencerminkan rencana penggunaan dan pemanfaatan yang benar – benar menjadi prioritas. Dalam tataran operasional, lahan digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia yang menguasai lahan untuk mensejahterakan hidupnya. Penggunaan oleh manusia tersebut sifatnya mendasar dan berlangsung terus menerus hingga memunculkan suatu hubungan hukum antara manusia pengguna dengan lahan yang digunakan. Terganggunya hubungan manusia pengguna dengan lahannya akan berimplikasi pada kesejahteraan pengguna lahan, karena itu perlu ada jaminan kepastian hukum. Meningkatnya jumlah penduduk memiliki korelasi yang positif dengan jumlah kebutuhan lahan, sementara ketersediaannya relatif tetap. Karena lahan bersifat terbatas, penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut haruslah efisien, tertib, dan teratur agar tidak merusak lingkungan. Hal tersebut dibina, diatur, ditata, dan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Permasalahan pemanfaatan lahan tersebutlah yang saat ini menjadi salah satu pokok tata guna lahan di Kabupaten Pringsewu yang dikhawatirkan berdampak negatif dan dapat berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok – Pokok Agraria yang mengamanatkan bahwa lahan mempunyai fungsi sosial, sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatannya perlu memperlihatkan kepentingan pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan, serta diwajibkan untuk memelihara lahan dan mencegah rusaknya.

Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten baru yang terbentuk di Provinsi Lampung. Terpisahnya Pringsewu dari Kabupaten Tanggamus tentu memberikan dampak yang

positif, terutama bagi pembangunan fisik dan sosial masyarakatnya. Terlebih lagi, letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat, dimana merupakan salah satu jalur penghubung Provinsi Lampung menuju sejumlah Provinsi-Provinsi di pantai Barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa dan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan wilayah diprovinsi Lampung. Beberapa sarana dan prasarana strategis nasional tentu nantinya akan dibangun di wilayah ini sehingga akan menyebabkan peningkatan perkembangan pembangunan dan investasi. Hal ini mulai dapat terlihat dimana kabupaten ini mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya kawasan ibukota kabupaten pringsewu dan koridor lintas barat Sumatera.

Isu strategis yang menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan di kabupaten Pringsewu diantaranya adalah masih kuatnya pengaruh kabupaten Tanggamus dan kota Bandar Lampung dalam konstelasi ruang di kabupaten Pringsewu, terbukanya akses jalan Lintas Barat Sumatera yang melintasi Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pringsewu dan kecamatan Pagelaran dalam dinamika pembangunan wilayah dan rencana pengembangannya sebagai titik simpul kegiatan utama di kabupaten pringsewu memberi dampak positif dalam proses pembangunan wilayah. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Pringsewu khususnya pembangunan di kecamatan pringsewu dan kecamatan Gading Rejo dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung dan beberapa kawasan strategis lainnya sebagai salah satu rencana yang akan di kembangkan oleh pemerintah provinsi Lampung perlu di dukung dan dipacu perkembangannya. Selain itu beberapa kawasan yang memiliki fungsi lindung terindikasi secara perlahan telah mengalami peralihan fungsi dan dimanfaatkan untuk kegiatan bukan lindung, akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan kabupaten Pringsewu yang cukup pesat memerlukan penataan dan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya dan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembangunan di Pringsewu harus dikontrol dan dikendalikan sesuai dengan fungsinya, serta memperhatikan kelestarian lahan tanaman pangan produktif yang menjadi isu strategis nasional,

Dalam kerangka pembangunan daerah, Neraca Penatagunaan Lahan Kabupaten merupakan data dan analisis perimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Neraca penggunaan Lahan meliputi: neraca perubahan penggunaan lahan, neraca kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW, dan prioritas ketersediaan lahan. Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah pasal 23 ayat (3) dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 33 ayat (2). Penggunaan lahan bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan tertib penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW, dengan tetap menjamin kepastian hukumnya dan menciptakan efisiensi penggunaan lahan yang lebih berkeadilan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 23 PP No 16 tahun 2004 menegaskan bahwa penyelenggaraan penatagunaan lahan terdiri dari antara lain penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan menurut fungsi kawasan yang meliputi: (1) Penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan (2) penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan lahan (3) penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan lahan.

1.2 Tujuan dan sasaran

Penyusunan neraca lahan kabupaten pringsewu bertujuan untuk memberikan data ketersediaan lahan bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW dan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan lahan.

Sasaran penyusunan Neraca Penatagunaan Lahan adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar rujukan dalam memberikan perizinan perolehan lahan bagi pengembangan pembangunan di kabupaten Pringsewu.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 pasal 23 (3) tentang Penatagunaan Tanah.
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 33 (2) tentang Penataan Ruang.

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu.
5. Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupten Pringsewu 2011-2031 .

1.4 Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Pringsewu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan inventarisasi dan pembaharuan data penggunaan lahan, yang terdiri dari data-data perubahan penggunaan lahan serta gambaran umum penguasaan lahan berdasarkan tinjauan dokumen RTRW serta pustaka-pustaka pendukung lainnya serta hasil survei lapangan.
2. Analisis Penanggunaan Lahan, meliputi kegiatan-kegiatan analisis yang memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis dan teknologi Penginderaan Jauh untuk menghasilkan:
 - a. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan
 - b. Analisis Perubahan penggunaan Lahan
 - c. Analisis Ketersediaan Lahan

1.5 Hasil Akhir

Hasil akhir dari penelitian ini berupa analisis neraca penggunaan lahan yang menginformasikan ketersediaan lahan berdasarkan kondisi penggunaan dan penguasaan lahan. Dokumen neraca penggunaan Lahan ini dapat digunakan sebagai dokumen penunjang untuk Penyempurnaan Kembali (Revisi) Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai salah satu dokumen rujukan dalam menentukan Arahan Kebijakan pengembangan wilayah dan dasar rujukan dalam memberikan perizinan perolehan lahan bagi pengembangan pembangunan.

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN LAHAN

2.1. Kerangka Konseptual

Masalah lingkungan hidup sedang menjadi isu global terutama tiga dekade terakhir. Isu lingkungan hidup telah mendorong pemerintahan diberbagai Negara mengembangkan kebijaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Ekosistemnya antara lain UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Dalam pelaksanaannya pendekatan regulasi ini menghadapi banyak kendala dilapangan. Pendekatan pengembangan wilayah yang dilakukan berupa pembentukan zona penyangga (*buffer zone*). Pada zona penyangga dapat dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat dan sekaligus dapat menunjang fungsi-fungsi yang terdapat pada kawasan lindung. Salah satu faktor penting dalam penembangan wilayah adalah perencanaan dan pengendalian penatagunaan lahan. Penggunaan dapat mengarah pada hal yang negatif (kegiatan yang tidak terkendali dan merugikan) jika tidak ada kontrol dari pemerintah.

2.1.1. Lahan

Lahan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena semua aktivitas kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lahan. Lahan dibutuhkan untuk menunjang ketersediaan pangan, sandang, papan, amenity, dan fasilitas kehidupan dasar lainnya, dalam kuantitas, kualitas dan tingkat keragaman tertentu. Istilah lahan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berbeda di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa pendatang (FAO, 1976 dalam Hardjowigeno, et al., 1999).

Lahan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada tanah. Tanah (Soil) adalah benda alam yang heterogen dan dinamis yng terbentuk oleh hasil kerja interaksi antara iklim dan jasad hidup terhadap suatu bahan induk yang dipengaruhi oleh relief dan waktu (Arsyad, 1989; Sitorus, 1996; Sinukaban, 1985). Sedangkan pengertian lahan juga mencakup karakteristik fisik dari tanah itu sendiri, seperti kemiringan, pola drainase, bahaya banjir, bahaya erosi, lokasi, ukuran petak, penguasaannya serta panguaannya (London, 1984, dalam Saefulhakim, 1986). Setiap bidang lahan

lokasinya tetap, tidak dapat dipindahkan, tidak bertambah (kecuali reklamasi) atau berkurang, maka kebijaksanaan lahan harus berorientasi pada konservasi.

Dari pengertian ekonomi, lahan merupakan sumberdaya yang tidak hanya sebagai *terra firma*, namun juga kandungan mineral, air disekitarnya, flora dan fauna yang hidup diatasnya, cahaya, udara, dan lain-lain. Pengertian ini lebih luas dari pengertian geografi fisik di atas (Lichfield dan Drabkin, 1980 *dalam* Saefulhakim, 1994). Dalam pengertian ini lahan dipandang sebagai komoditas yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi sehingga memiliki biaya, nilai dan harga.

2.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan baik bersifat permanen (tetap) atau *cyclic* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik materil dan spiritual (Vink, 1975 *dalam* Sitorus, 1989). Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami perubahan yang terus menerus, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia (Saefulhakim dan Nasoetion, 1995). Dengan demikian pemahaman struktur penggunaan lahan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dinamika sosial ekonomi dan kelembagaan yang berkembang didalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam memanfaatkan lahan, Barlowe (1978) menyebutkan ada tiga faktor yang penting untuk dipertimbangkan yaitu, (1) kesesuaian Bio-fisik, (2) kelayakan sosial-ekonomi, (3) kelayakan kelembagaan. Kesesuaian bio-fisik mencakup keseluruhan sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, dan kependudukan. Sementara pertimbangan faktor ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Sedangkan faktor kelembagaan dicirikan oleh hukum/ perundang-undangan pertanahan yang berlaku dimasyarakat, dan keadaan sosial politik yang secara administrasi dapat dilaksanakan.

Pola penggunaan lahan didefinisikan sebagai konfigurasi spasial dari penggunaan suatu wilayah untuk waktu tertentu. Umumnya pola penggunaan lahan merupakan refleksi aktivitas manusia yang memerlukan lahan untuk memproduksi bahan pangan, rumah dan lain-lain (Marsh, 1991 *dalam* Saefulhakim, 1994). Sepuluh kelas penggunaan Barlowe (1978) dan Saefulhakim (1994) adalah sebagai berikut : (1) lahan pemukiman, (2) lahan indistri dan perdagangan, (3) lahan bercocok tanam, (4) lahan berumput dan rumput makanan ternak, (5) lahan hutan, (6) lahan mineral, (7) lahan rekreasi, (8) lahan pelayanan jasa, (9) lahan transportasi, (10) lahan tempat pembuangan. Penggunaan suatu lahan di jumpai dilapangan kadang-kadang merupakan kombinasi dari dua atau lebih kelas penggunaan lahan di atas. Penggunaan lahan didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan yaitu dalam bentuk peraturan-perundangan, dan rencana tata ruang wilayah dan kawasan. Kebijakan pemerintah ini

diharapkan dapat mengakomodasi beberapa kepentingan dan memberikan petunjuk tentang penggunaan lahan yang optimal dan lestari.

Kebutuhan lahan meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta perkembangan struktur masyarakat sebagai konsekuensi logis dari proses-proses pembangunan, sementara ketersediaan lahan dibatasi oleh luasan permukaan yang bersifat tetap. Akibatnya terjadi fenomena kelangkaan lahan yang kemudian memunculkan berbagai fenomena konflik penggunaan lahan yang semakin tajam dari waktu ke waktu. Struktur konflik penggunaan lahan menjadi semakin kompleks sejalan dengan berkembangnya struktur kebutuhan manusia, baik dari sisi pola maupun besarnya, pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur perekonomian. Fenomena konflik penggunaan lahan juga terkait dengan fenomena eksternalitas serta nilai lahan yang bersifat sosial ekonomi dan politik (Saefulhakim, 1996).

2.1.3. Perubahan Penggunaan Lahan

Pemahaman tentang perubahan penggunaan lahan dapat didekati dari struktur utama yang berkaitan langsung dengan perubahan lahan. Kebutuhan sumberdaya lahan menjadi faktor pendorong proses perubahan penggunaan lahan, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu (1) deforestasi baik kearah pertanian maupun non-pertanian, (2) konversi lahan pertanian ke non-pertanian, dan (3) penelantaran lahan. Pada dasarnya aspek permintaan lahan berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sosial ekonomi, peningkatan efisiensi industri dan kelembagaan, penurunan tingkah laku spekulatif dan pengontrolan peningkatan jumlah penduduk.

Selanjutnya dari segi penawaran sumberdaya lahan, ketersediaan lahan dibatasi oleh luasan permukaan yang tetap. Kualitas lahan yang bervariasi dan penyebarannya secara spasial tidak merata dan cenderung tetap menyebabkan penawaran penggunaan lahan bersifat inelastik terhadap besarnya permintaan akan lahan. Penawaran sumberdaya lahan ini juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan lahan saat ini. Penggunaan lahan saat ini berpengaruh terhadap elastisitas lahan untuk berubah penggunaannya. Penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan fasilitas sosial ekonomi memiliki elastisitas yang rendah untuk berubah. Sedangkan penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan dan perkebunan memiliki elastisitas yang lebih tinggi untuk berubah kearah penggunaan lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan efisiensi dalam penggunaan lahan, dimana penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan fasilitas sosial-ekonomi memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan lahan pertanian, kehutanan dan perkebunan.

Struktur ketiga yang berpengaruh terhadap perubahan lahan adalah struktur penguasaan teknologi yang berkaitan langsung terhadap produktivitas lahan. Produktivitas lahan mempunyai

peran yang cukup besar dalam menurunkan ketergantungan terhadap ekstensifikasi usaha tani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

Masalah deforestasi merupakan masalah mendasar yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan dan pantai di Indonesia. Berbagai hasil penelitian telah melaporkan akibat dari deforestasi terhadap lingkungan hidup seperti kebakaran hutan yang mengakibatkan munculnya permasalahan polusi udara, berubahnya fungsi kawasan lindung yang berdampak luas terhadap rusaknya sistem tata air, hilangnya biodiversitas plasma nutfah (keragaman hayati) dan pemanasan bumi akibat efek rumah kaca.

Secara umum penggunaan lahan pertanian khususnya sawah merupakan prioritas terakhir dalam pemilihan pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan nilai *land rent* sawah yang rendah. Salah satu akibat dari konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian ini adalah semakin menurunnya produktifitas lahan pertanian yang berakibat pada terganggunya upaya pencapaian swasembada beras nasional.

2.1.4. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain. Penataan ruang berasaskan : (1) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan; (2) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum (Anonymous, 1992).

Penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya, dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruang juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. (Kartasmita, 1996).

2.2. Kebijakan Penyelenggaraan Penatagunaan Lahan

Kebijakan penatagunaan lahan meliputi kebijakan penatagunaan pemanfaatan lahan kawasan budidaya. Penatagunaan lahan ini diselenggarakan terhadap bidang-bidang lahan yang sudah ada haknya maupun pada lahan Negara. Penatagunaan lahan harus memperhatikan beberapa prinsip dasar sebagai sub sistem dari tata ruang sebagai berikut (A) Penggunaan, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan fungsi kawasan. (B) Penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan yang telah sesuai (Dapat diberikan hak atas lahan; Pemegang hak atas lahan wajib menggunakan, memanfaatkan memelihara, dan mencegah kerusakan lahan) (C) Penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan : (Hak atas lahan tetap diakui; Penggunaan

dan Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan fungsi kawasan; Tidak boleh diberikan hak atas lahan sebelum dilakukan penyesuaian).

Penyusunan pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan meliputi: (a) Inventarisasi penguasaan penggunaan dan pemanfaatan lahan. (b) Pembuatan neraca penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. (c) Tahapan penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.

Pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan disusun oleh instansi yang berwenang dalam bidang perlahanan dengan mempertimbangkan (a) Hak-hak keperdataan masyarakat pemilik lahan. (b) Kebijakan penatagunaan lahan. (c) Investasi pembangunan sarana dan prasarana. Sehubungan dengan penyelenggaraan penatagunaan lahan tersebut diawali dengan inventarisasi data/peta penggunaan lahan dan tata ruang wilayah dan untuk gambaran umum penguasaan lahan terhadap fungsi RTRW, kesesuaian lahan menurut gambaran umum penguasaan lahan dan arahan program (ketersediaan lahan) sebagai strategi pelaksanaan penatagunaan lahan. Pada dasarnya strategi utama dalam penatagunaan lahan adalah : (a) Pemberdayaan penggunaan dan pemanfaatan lahan, diarahkan pada jenis-jenis penggunaan lahan yang telah sesuai dengan fungsi kawasan RTRW. (b) Penataan penggunaan lahan diarahkan pada jenis-jenis penggunaan lahan yang mendukung dengan fungsi kawasan RTRW (c) Penyesuaian penggunaan lahan, diarahkan pada jenis-jenis penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan RTRW

Pelaksanaan pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan dapat dilakukan melalui: (a) Penataan kembali (b) Upaya Kemitraan (c) Penyerahan dan pelepasan hak atas lahan kepada Negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan diatur dalam berbagai pedoman, standardan criteria teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pembinaan dan Pengendalian. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan koordinasi dengan sector-sektor terkait baik Pemerintah Tingkat Pusat, Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kegiatan Pengendalian ini meliputi kegiatan pengawasan penerbitan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Gambaran Geografi Wilayah

Kabupaten Pringsewu, dengan Ibukota Pringsewu, secara geografis terletak diantara $104^{\circ}45'25''$ - $105^{\circ}8'42''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}8'10''$ - $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625,1 km² atau 62.510 Ha. Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Adapun batas administratif dari Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut : (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. (2) Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus. Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu No. 12 tahun 2012, maka Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara (hasil pemekaran dari Kecamatan Pagelaran)

3.2. Kondisi Fisik Wilayah

Dari hasil intepretasi data SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), elevasi lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dibagi menjadi 5 kelas, antara lain: 0- 100 meter dpl, 100 - 200 meter dpl, 200- 300 meter dpl, 300 -400 meter dpl dan > 400 meter dpl. Berdasarkan data kelas ketinggian tersebut, diketahui bahwa wilayah ini memiliki kawasan yang berada pada ketinggian > 400 meter dpl berupa daerah pegunungan. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) bagian yang bervariasi yaitu mulai dari kelas lereng 0-8 % sampai > 40 %. Wilayah yang berbukit terjal terdapat di bagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di sebelah Barat Daya (Kecamatan Pagelaran). Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar umumnya tersebar di bagian tengah wilayah kabupaten dan hampir meliputi seluruh kecamatan.

Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gading Rejo dan Sukoharjo. Lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Pardasuka.

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri

geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan di Kabupaten Pringsewu berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13, 1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,90C - 32,40C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimal adalah 1008, 1 Nbs dan maksimal adalah 936,2 Nbs di Kabupaten Pringsewu. Dengan karakteristik iklim tersebut, wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terletak dalam DAS Sekampung dan Sub DAS-nya terletak dalam beberapa Sub-DAS yaitu : Sub DAS Way Sekampung Anak, dengan luas 12.575,90 Ha (20,12%); Sub DAS Way Bulok, dengan luas 15.144,96 Ha (24,23%); Sub DAS Way Semah, dengan luas 2.209,20 Ha (3,53%); Sub DAS Mreabung Ilahan Sulca, dengan luas 20.081,02 Ha (32,12%); dan Sub DAS Way Tebu, dengan luas 12.498,92 Ha (20,00%). Potensi hidrologi lain yang berada di Kabupaten Pringsewu adalah Cekungan Air Tanah (CAT). CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah merupakan dasar pengelolaan air tanah yang dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah. Di Kabupaten Pringsewu cekungan air tanah meliputi (1) CAT Metro-Kota Bumi (2) CAT Talang Padang. (3) CAT Tidak potensial/tidak ada cekungan berada di sebagian wilayah Kecamatan Pagelaran dan Pardasuka.

Beberapa Jenis Tanah di kabupaten Pringsewu adalah regosol, gleisol, kambisol, dan podsolik.

- Regosol . Dikenal sebagai tanah pasir, karena lebih dari 60% komposisinya terdiri dari pasir, sehingga teksturnya sangat kasar. Tanah ini merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan. Regosol berkembang dari bahan endapan pasir pantai, berupa pasir kwarsa (pasir putih).
- Gleisol. Merupakan tanah yang terpengaruh oleh air, yang ditandai dengan adanya lapisan gleisol yang berwarna abu-abu/keabu-abuan. Lapisan tanah (horison A) telah mengalami pencucian liat dan unsur hara. Jenis tanah ini, meski juga terdapat dalam bentuk asosiasi dengan jenis tanah lain dalam Satuan Lahan dalam Grup Dataran dan Vulkan, terutama terdapat dalam satuan Lahan grup Aluvial. Dalam Asosiasinya dengan tanah Kambisol dalam satuan lahan grup Aluvial, jenis tanah ini merupakan tanah yang relatif subur dibanding yang lain dan banyak dimanfaatkan sebagai tanah persawahan.
- Kambisol. Merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk tua, yakni batuan Hat dan batuan vulkanik masam, di bawah rezim iklim basah. Tanah ini ditandai oleh adanya penimbunan liat pada horison B-2. Namun horison penimbunan Hat ini tidak memenuhi syarat sebagai horison argilik, karena peningkatan kadar liat pada lapisan ini kurang dari 1,2 kali kadar liat di lapisan atasnya. Umumnya tanah ini hampir mirip podsolik, namun lebih gembur dibanding Podsolik. Demikian halnya pH-nya juga lebih tinggi dibandingkan Podsolik. Jenis tanah Kambisol Eutrik yang berasosiasi dengan tanah Gleisol banyak

dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Sementara jenis tanah Kambisol Distrik dalam asosiasinya dengan tanah podsolik banyak dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering dan perkebunan.

- Podsolik. Merupakan tanah yang berumur tua sehingga telah memiliki tingkat perkembangan lanjut. Lapisan tanah (horizon A) telah mengalami pencucian liat dan unsur hara, dengan kelas teksturnya lebih dari lapisan bawahnya (horison B). Secara umum, tanah Podsolik memiliki potensi yang relatif kurang subur, yang ditandai dengan sifatnya yang masam, daya retensi dan fiksasi terhadap hara tinggi. Jenis tanah ini banyak dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering dan perkebunan.

3.3. Kependudukan

Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk 364.825 jiwa, dengan persebaran penduduk terbesar berada di kecamatan Pringsewu sebesar 20,84%. Sedangkan persebaran penduduk terkecil berada di banyumas sebesar 5,21%. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa kecamatan Pringsewu merupakan pusat ibukota dan pusat perekonomian dari Kabupaten Pringsewu, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk untuk bermukim disana.

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk secara umum menunjukkan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk yang positif. Hasil analisis menunjukkan laju pertumbuhan Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 1,35% per-tahun. Hal ini dimungkinkan terjadi diantaranya selain disebabkan oleh pertumbuhan alami, juga dikarenakan pemekaran wilayah yang dialami oleh kabupaten ini, sehingga mendorong banyak masyarakat pendatang untuk bennukim dan mencoba mengambil peruntungan ditengah berkembang pesatnya proses pembangunan di wilayah ini sebagai kabupaten baru.

Namun demikian masih terdapat pula pertumbuhan negatif yang terjadi di Kecamatan Pringsewu. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kondisi tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini di Kecamatan Pringsewu. Sebagaimana diketahui, bahwa Kecamatan Pringsewu sejak belum dimekarkan dari Kabupaten Tanggamus telah berkembang menjadi sebuah pusat kegiatan. Dengan posisi yang berada pada jalur lintas barat Sumatera yang strategis, telah menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah yang sangat ramai.

Kondisi tersebut di atas, telah menjadikan lahan di wilayah ini telah menjadi primadona bagi para pelaku bisnis dan usaha lainnya. Kondisi tersebut cenderung akan memicu terjadinya alih fungsi lahan dari permukiman ke non-permukiman yang lebih pesat dari daerah lainnya. Bahkan tak jarang terjadi pula alih peruntukkan lahannya Bangunan perumahan/tempat tinggal telah tergantikan oleh bangunan komersil. Sehingga tentunya lahan bagi permukiman semakin terbatas dan pertumbuhan penduduk diprediksi akan mengalami perubahan signifikan yaitu angka pertumbuhan yang sangat kecil atau bahkan menjadi menurun.

Berdasarkan kepadatan penduduk per-kecamatan menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki penyebaran penduduk yang tidak merata Hal ini terlihat dari interval angka kepadatan penduduk antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang sangat berjauhan angka kepadatannya Adapun kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pringsewu

sebesar 1.427 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pardasuka sebesar 340 jiwa/km². Angka kepadatan yang tinggi di Kecamatan Pringsewu dimungkinkan dikarenakan sebagai wilayah ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian.

Kecamatan Pringsewu telah memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sosial-ekonomi yang lebih lengkap dan memiliki tingkat perkembangan yang lebih cepat dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk di untuk tinggal bermukim dan melakukan aktivitas usaha sebagai mata pencaharian. Sedangkan Kecamatan Pardasuka merupakan wilayah yang terletak cukup jauh dari pusat ibukota, dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, luasan ruang terbuka yang cukup besar, dan angka jumlah penduduk yang relatif kecil, menjadikan wilayah ini masih memiliki angka kepadatan penduduk yang rendah.

3.4. Uraian Rencana Tata Ruang Kabupaten Pringsewu

Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Pringsewu adalah mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang berkembang maju sebagai Pusat Perekonomian melalui pengembangan ruang bagi Perdagangan dan Pelayanan Jasa skala regional yang berdaya saing kuat dengan mengedepankan pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan (berkelanjutan) serta didukung oleh potensi sumberdaya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan visi penataan ruang Kabupaten Pringsewu tersebut, maka misi penataan ruang yang ditempuh adalah :

1. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang berkembang melalui pengembangan pusat kabupaten serta pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasiskan keunggulan kompetitif dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan;
2. Mewujudkan kemampuan daya saing daerah yang unggul dalam perdagangan dan pelayanan jasa untuk mencapai daerah yang lebih makmur dan sejahtera, melalui penyediaan ruang bagi kawasan perdagangan dan jasa;
3. Mewujudkan iklim pengembangan potensi wilayah yang kondusif, sehingga menarik minat penanam modal untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Pringsewu sehingga mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah yang berkembang maju melalui pembangunan fasilitas pelayanan umum skala regional serta fasilitas lainnya untuk mendukung aktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan pengembangan potensi wilayah berbasis agro melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal guna peningkatan perekonomian wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah berbasis pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan (*sustainable development*) melalui upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana longsor.

7. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa dalam membangun daerah yang maju, nyaman dan ramah lingkungan melalui penyediaan ruang bagi pengembangan kegiatan pendidikan.

3.5. Kebijakan dan Startegi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu

Dalam upaya mencapai terwujudnya tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah ditentukan di atas, maka perlu ditentukan beberapa kebijakan dan langkah strategi yang dapat ditempuh sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah kedepannya. Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah.
2. Pengalokasian ruang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baik di pusat kota maupun di pusat-pusat pelayanan wilayah lainnya, yang mendukung perwujudan kegiatan perekonomian perkotaan dengan skala nasional dan internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.
3. Pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan dukungan peran pemerintah daerah sebagai regulator, dengan menyiapkan prosedur teknis yang komprehensif, yang mampu dijadikan sebagai alat pengendali dalam pemanfaatan lahan.
4. Pengembangan kelengkapan prasarana dan sarana wilayah sebagai upaya dukungan terhadap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan serta pengembangan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan sebagai *hinterland*-nya.
5. Pengembangan sistem agro minapolitan sebagai upaya peningkatan komoditi unggulan daerah yang diintegrasikan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana.
7. Pengembangan kawasan budidaya yang optimal dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu sebagai bagian dari upaya perwujudan ruang perkotaan yang harmonis dan dinamis dengan pengembangan wilayah belakangnya.
8. Pengembangan kawasan strategis sebagai kawasan prioritas untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang pengembangannya dinilai strategis dalam rangka mendukung pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa langkah strategi sebagai panduan dalam operasionalisasi pendukung kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah.
2. Pengalokasian ruang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baik di pusat kota maupun di pusat-pusat pelayanan wilayah lainnya, yang mendukung perwujudan kegiatan perekonomian perkotaan dengan skala nasional dan internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.
3. Pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan dukungan peran pemerintah daerah sebagai regulator, dengan menyiapkan prosedur teknis yang komprehensif, yang mampu dijadikan sebagai alat pengendali dalam pemanfaatan lahan.
4. Pengembangan kelengkapan prasarana dan sarana wilayah sebagai upaya dukungan terhadap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan serta pengembangan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan sebagai *hinterland*-nya.
5. Pengembangan sistem agro minapolitan sebagai upaya peningkatan komoditi unggulan daerah yang diintegrasikan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana.
7. Pengembangan kawasan budidaya yang optimal dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu sebagai bagian dari upaya perwujudan ruang perkotaan yang harmonis dan dinamis dengan pengembangan wilayah belakangnya.
8. Pengembangan kawasan strategis sebagai kawasan prioritas untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang pengembangannya dinilai strategis dalam rangka mendukung pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.

3.6. Rencana Pusat Kegiatan

Dalam rangka menentukan jenjang tingkat pelayanan setiap pusat kegiatan, tentunya perlu didukung pula oleh informasi mengenai besarnya kemampuan suatu wilayah untuk berkembang atau menerima perkembangan yang bergantung dari potensi perkembangan yang dimiliki.

Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan yang dimiliki, semakin tinggi pula kemampuan pusat kegiatan tersebut dalam menerima perkembangan. Selain itu dengan potensi berkembang yang lebih baik dibandingkan potensi berkembang wilayah lainnya juga akan menaikkan tingkat kemampuan pelayanan pusat kegiatan tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu kedepannya serta memberikan arahan dalam penyusunan struktur ruang wilayah kabupaten, maka dilakukan penetapan pusat-pusat pelayanan yang juga didasarkan kepada kebijakan struktur ruang di atasnya serta hasil analisis pengembangan wilayah kedepannya. Adapun pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Pringsewu berikut fungsi pelayanan yang diembannya selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada uraian dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),
2. Gadingrejo akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Gadingrejo saat ini sudah berkembang menjadi PPK, yang merupakan kawasan perkotaan hirarki II, di bawah hirarki kawasan perkotaan Pringsewu (*Berdasarkan Kepmen PU No. 16/PRT/M/2009 dinyatakan bahwa yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanyalah PPK*)
3. Pagelaran (Pagelaran dan Pagelaran Utara), Ambarawa, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas dan Pardasuka, akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ke-5 (lima) pusat tersebut merupakan kawasan perkotaan hirarki III yang akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan dan menjadi simpul transportasi bagi beberapa kecamatan dan beberapa desa lainnya.

3.7. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Pringsewu. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hirarki sesuai potensi yang telah dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan di masa mendatang. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi yang ada saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepannya ditentukan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dalam kajian pola keterkaitan (*lingkages*) antar simpul/pusat ini akan dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Identifikasi simpul/pusat dan keefektifannya sebagai pusat pelayanan; (2) Orientasi dan jarak pelayanan pusat yang bersangkutan; (3) Administrasi pemerintahan, terutama pada tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dari olah data lapangan oleh tim penyusun data dan informasi kewilayahan pendukung RTRW Kabupaten Pringsewu, pusat pelayanan yang efektif di pedesaan adalah desa yang menjadi orientasi pelayanan masyarakatnya, termasuk yang melayani atau menjadi orientasi dari desa-desa disekitarnya. Pelayanan yang paling efektif dalam hal ini adalah pelayanan ekonomi, khususnya perdagangan yang mencakup pemasaran produksi dan distribusi barang konsumsi. Ibukota kecamatan (IKK) mempunyai

pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, pelayanan administrasi, pemerintahan kecamatan dan jasa-jasa lainnya. Sedangkan ibukota kabupaten mempunyai pelayanan yang lebih kompleks/lengkap. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka rencana sistem perkotaan berikut peran dari masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut : Kawasan Pusat Perkotaan Pringsewu untuk tingkat Kabupaten Pringsewu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang berada di Kawasan Perkotaan Gadingrejo ; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada pada kawasan perkotaan Pagelaran (Pagelaran dan Pagelaran Utara) ; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada pada kawasan perkotaan Ambarawa ; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada pada kawasan perkotaan Sukoharjo ; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada pada kawasan perkotaan Adiluwih, Banyumas, dan Pardasuka.

BAB 4
METODOLOGI SURVEI DAN
PENGOLAHAN DATA

4.1. Metodologi Survei

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan survey ini terdiri dari pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, dan observasi lapangan. Pelaksanaan survey dilakukan secara serial agar setiap pembelajaran dari tiap kunjungan lapangan dapat diperbaiki pada kunjungan lapangan berikutnya.

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam Survey ini dilakukan dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu survey primer terkait dengan pengolahan peta citra dan survey terkait dengan pengumpulan data monitoring dan evaluasi non spasial. Survey primer pengolahan citra dilakukan bertujuan untuk validasi dan klarifikasi data. Survey ini akan dilakukan dua kali, pertama validasi hasil interpretasi peta eksisting dari citra dan kedua akan dilakukan validasi akhir ketika peta overlay kesesuaian sudah dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam survey ini adalah *groundcheck* lapangan yaitu melakukan monitoring langsung dan validasi digitasi berdasarkan kondisi di lapangan. Sampai dengan pelaporan ini dibuat, pelaksanaan survey ini belum dilakukan karena proses penginderaan jauh peta citra belum selesai 100% baik di Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Lampung. Terkait dengan survey primer non spasial, sesuai dengan tujuannya maka metodologi surveynya tampak seperti gambar berikut.

Tabel IV.1: Metodologi survei

TAHAPAN SURVEY	TUJUAN SURVEY	PENDEKATAN
Survey primer awal	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan data dan informasi dasar, khususnya isu-isu, potensi, dan tantangan pemanfaatan ruang • Melakukan monitoring berbagai objek struktur dan pola ruang RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Discussion</i> ke berbagai instansi • <i>Depth Interview</i>, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap informasi terkait dengan isu-isu, potensi, dan tantangan pemanfaatan ruang • Wawancara ke masyarakat terhadap isu-isu kritis • Melakukan <i>check</i> dan pencatatan langsung pada objek monitoring
Survey primer analisis	Melakukan validasi dan klarifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan langsung instansi untuk mendapatkan masukan
Survey primer akhir	Melakukan validasi dan klarifikasi terhadap hasil evaluasi dengan cara <i>participatory assesment</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Depth Interview</i> sebagai komparasi dari hasil kesesuaian evaluasi

Sumber : Hasil Analisis

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dari setiap instansi yang berhubungan dengan sasaran kegiatan. Data sekunder tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan kedua setelah data primer yang didapatkan dari hasil survey langsung ke lapangan. Data sekunder ini juga menjadi data pendukung untuk memperkuat justifikasi dari evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Data sekunder yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

TABEL IV.2: kebutuhan data sekunder

No.	Sumber Data	Jenis Informasi	Kategori Data	Metoda Inventarisasi Data	Perangkat Penunjang Survey
1	Dokumen perencanaan tata ruang	1. RTRW Provinsi 2. RTRW Kabupaten 3. Penggunaan Lahan 4. Neraca Lahan 2010 5. Penguasaan Lahan 6. Data Sosial Ekonomi	Data rujukan	Survey Sekunder	Surat Pengantar dan Checklist Data
4	Citra Satelit	1. Landsat-8 2015 2. SPOT-6 2015	Data Citra (Data Kondisi Aktual)	Remote Sensing	GPS, Peta Dasar
5	Peta	1. RBI Kab.pringsewu 2. Peta dan Data Jaringan Jalan 3. Peta Kawasan Hutan 4. Peta Kawasan Permukiman dan Perumahan 5. Peta sebaran infrastruktur sosial 6. Peta penggunaan lahan 7. Peta status lahan 8. Peta jaringan air minum dan listrik 9. Peta Tematik Lainnya (RTRW)	Data Kondisi Awal Perencanaan	Analisis Digital	Hard Copy

Sumber : Hasil Analisis

4.2. Pelaksanaan Survei Spasial

4.2.1. Hasil Pengumpulan Data Spasial

Proses pengumpulan data sekunder spasial dilakukan berbarengan dengan pengumpulan data non spasial pada saat survei dan diskusi sebagaimana yang uraikan diatas. Berdasarkan pelaksanaan survei tersebut hasil pengumpulan data sekunder yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5 : Data Spasial Kabupaten Pringsewu

No	Nama Data	Cakupan	Form	Keterangan	Atribut	Sumber
1	Batas Administrasi Kecamatan	Kab. Pringsewu	Shp 2011	Topology dan Batas Pemekaran diperbaharui	Nama_Kecamatan	Bappeda Kab. Pringsewu
2	Batas Administrasi Kabupaten/Kota	Kab. Pringsewu	Shp 2011	Jumlah Kec. 8 + 1 Kec. Pemekaran	Nama_Kecamatan	Bappeda Kab. Pringsewu

				Pagelaran Utara		
3	Jalan	Kab. Pringsewu	Shp		Toponimi (Jalan Arteri, Kereta dll)	Bappeda Kab. Pringsewu
4	Peta RBI	Kab. Pringsewu	dwg		Atribut tidak menjelaskan Objek-objek pada peta	Bappeda Kab. Pringsewu
5	Citra Landsat	Kab. Pringsewu	.si 2000	Bukan data mentah	Pixel value	Bappeda Kab. Pringsewu
6	Sungai	Kab. Pringsewu	Shp		Length	Bappeda Kab. Pringsewu
7	Bathimetry	Kab. Pringsewu	tif			Bappeda Kab. Pringsewu
8	Data Pendukung : Bandara, pelabuhan, terminal, fasilitas, sungai, sempadan sungai, waduk, sempadan waduk, titik desa, titik kecamatan, titik kabupaten, titik ketinggian	Kab. Pringsewu	shp		Toponimi	Bappeda Kab. Pringsewu
9	Data Point of Interest Per Kab/Kota (wisata, pelabuhan, bandara, gunung, terminal, kantor, sarana transport, dll)	Kab. Pringsewu	shp		Toponimi	Bappeda Kab. Pringsewu
10	Jaringan Energi	Kab. Pringsewu	Shp		Jenis Jaringan	Bappeda Kab. Pringsewu
11	Kaw. Kehutanan	Kab. Pringsewu	Shp		Nama_Kawasan	Bappeda Kab. Pringsewu
12	Kaw. Strategis	Kab. Pringsewu	Shp		Nama_Kawasan	Bappeda Kab. Pringsewu
13	Pengairan	Kab. Pringsewu	Shp		Nama_Irigasi	Bappeda Kab. Pringsewu
14	Peruntukan Lahan	Kab. Pringsewu	Shp	Saling overlap	Peruntukkan	Bappeda Kab. Pringsewu
15	Pusat Kegiatan	Kab. Pringsewu	Shp		PKN, PKW, PKL	Bappeda Kab. Pringsewu
18	Pola Ruang	Kab. Pringsewu	shp	Perlu Perbaharuan	Rencana_Pemanfaatan	Bappeda Kab. Pringsewu

Pada dasarnya, data spasial yang tersedia dari pemerintah daerah pringsewu sudah cukup untuk dapat dilakukannya proses evaluasi pemanfaatan lahan. Hanya saja ada beberapa data yang belum dalam format digital sehingga diperlukan proses digitasi terlebih dahulu dan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak.

4.2.2. Perbaikan Survei Spasial

Untuk menjaga kualitas hasil interpretasi peta citra eksisting, maka perlu dilakukan survei groundcheck lahan secara sampling maupun pada lahan-lahan kritis. Survei groundcheck ini dilakukan dua kali yaitu pertama ketika semua proses analisis GIS selesai dilakukan dan kedua ketika semua proses

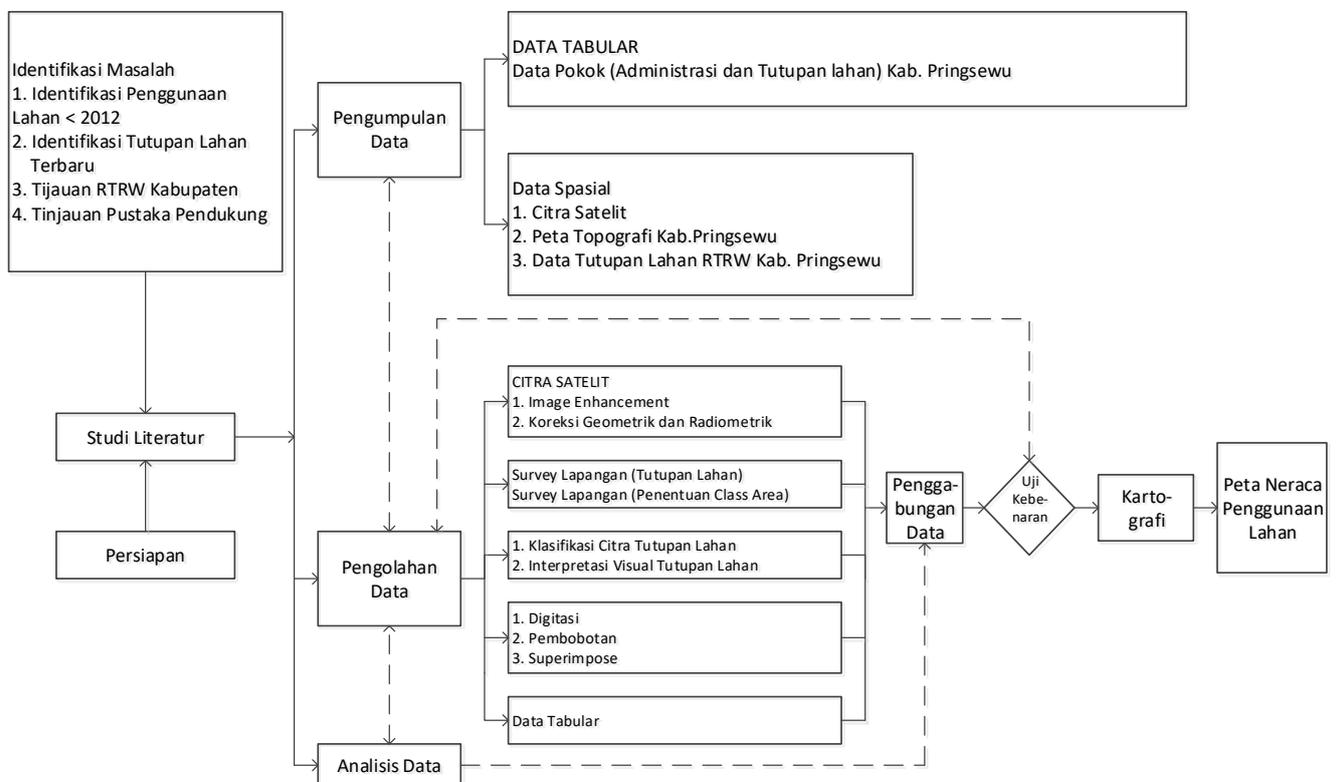
evaluasi GIS selesai dilakukan. Survei ground check dilakukan untuk memastikan apakah hasil klasifikasi citra satelit sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Survei ini dilakukan dengan cara menentukan lokasi titik-titik survei yang mewakili seluruh kelas lahan yang tampak pada citra satelit. Jumlah titik survei setiap kelas lahan direncanakan sebanyak tiga titik.

Alat yang diperlukan untuk survei ini adalah Peta kerja dan smartphone berbasis Android dengan aplikasi yang harus sudah terinstal pada smartphone tersebut adalah MapInr. Peta kerja digunakan untuk membandingkan hasil pengolahan citra di studio dengan kondisi real di lapangan. Sedangkan aplikasi Mapinr dapat membantu dalam navigasi sebagai peralatan tambahan GPS handheld. Kelebihan aplikasi Mapinr dapat digunakan untuk marking hasil survei, mengambil foto hasil survei dan mencatat hasil survei.

4.2.3. Groundcheck

Kegiatan Survey juga dilakukan menyebar di wilayah kabupaten Pringsewu. Kegiatan terdiri dari survey lapangan dengan mengunjungi 28 titik pengamatan yang dipilih dengan menyesuaikan dengan hasil analisis GIS. Titik-titik yang dipilih merupakan titik yang dikategorikan memiliki potensi ketidaksesuaian guna lahan.

Gambar 4.1 : Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan



4.3. Pendekatan Dan Teknik Analisis Kesesuaian Lahan Berbasis Gis

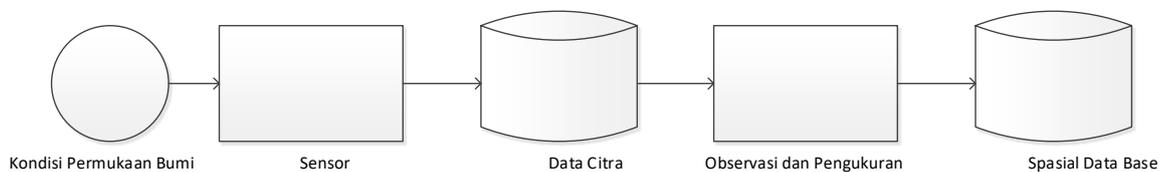
Berdasarkan pedoman diatas, dalam analisis monev berbasis GIS pembuatan peta dasar atau peta kerja mutlak dilakukan sebagai representasi data eksisting dari peta rencana RTRW. Pembuatan peta kerja ini merupakan pengolahan dari peta citra satelit. Tahap pelaksanaannya dapat dilihat pada diagram 4.1:

4.3.1. Penginderaan Jauh

A. Penginderaan jauh dan Citra Landsat 8

Penginderaan jauh atau inderaja (remote sensing) adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,1979).

Diagram 4.2: Metode Remote Sensing



Bagan alur diatas menunjukkan pengambilan data dengan metode penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang digunakan pada pekerjaan ini adalah Citra Landsat 8 dan SPOT-6. Dalam kegiatan ini proses lebih dititik beratkan menggunakan Landsat sedangkan sebagai pembanding digunakan data SPOT hal ini dikarenakan resolusi spektral landsat lebih baik dibandingkan resolusi spektral SPOT

Satelit LDCM (Landsat-8) dirancang membawa sensor pencitra OLI (Operational Land Imager) yang mempunyai 1 kanal inframerah dekat dan 7 kanal tampak reflektif, akan meliputi panjang gelombang yang direfleksikan oleh objek-objek pada permukaan Bumi, dengan resolusi spasial yang sama dengan Landsat pendahulunya yaitu 30 meter. Sensor pencitra OLI mempunyai kanal-kanal spektral yang menyerupai sensor ETM+ (Enhanced Thermal Mapper plus) dari Landsat-7, akan tetapi sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal yang baru yaitu : kanal-1: 443 nm untuk aerosol garis pantai dan kanal 9 : 1375 nm untuk deteksi cirrus, namun tidak mempunyai kanal inframerah termal.

Untuk menghasilkan kontinuitas kanal inframerah termal, pada tahun 2008, program LDCM (Landsat-8) mengalami pengembangan, yaitu Sensor pencitra TIRS (Thermal Infrared Sensor) ditetapkan sebagai pilihan (optional) pada misi LDCM (Landsat-8) yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI.

B. Image Enhancement

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Landsat 8 memiliki 11 band. Diantaranya band Visible, Near Infrared (NIR), Short Wave Infrared (SWIR), Panchromatic dan Thermal. Band 1,2,3,4,5,6,7 dan 9

mempunyai resolusi spasial 30 meter, band 8 mempunyai resolusi spasial 15 meter, sementara band 10 dan 11 resolusi spasialnya 100 meter.

Untuk memaksimalkan data Landsat 8, penggabungan antara resolusi 30 meter menjadi 15 meter sangatlah bermanfaat. Terutama untuk mempertajam obyek dalam melakukan analisis visual. Ini yang sering disebut proses image enhancement. Pada umumnya proses ini sering dilakukan di software Remote Sensing seperti ERDAS, ENVI atau Er Mapper. Proses image enhancement ini bisa dilakukan di ArcGIS.

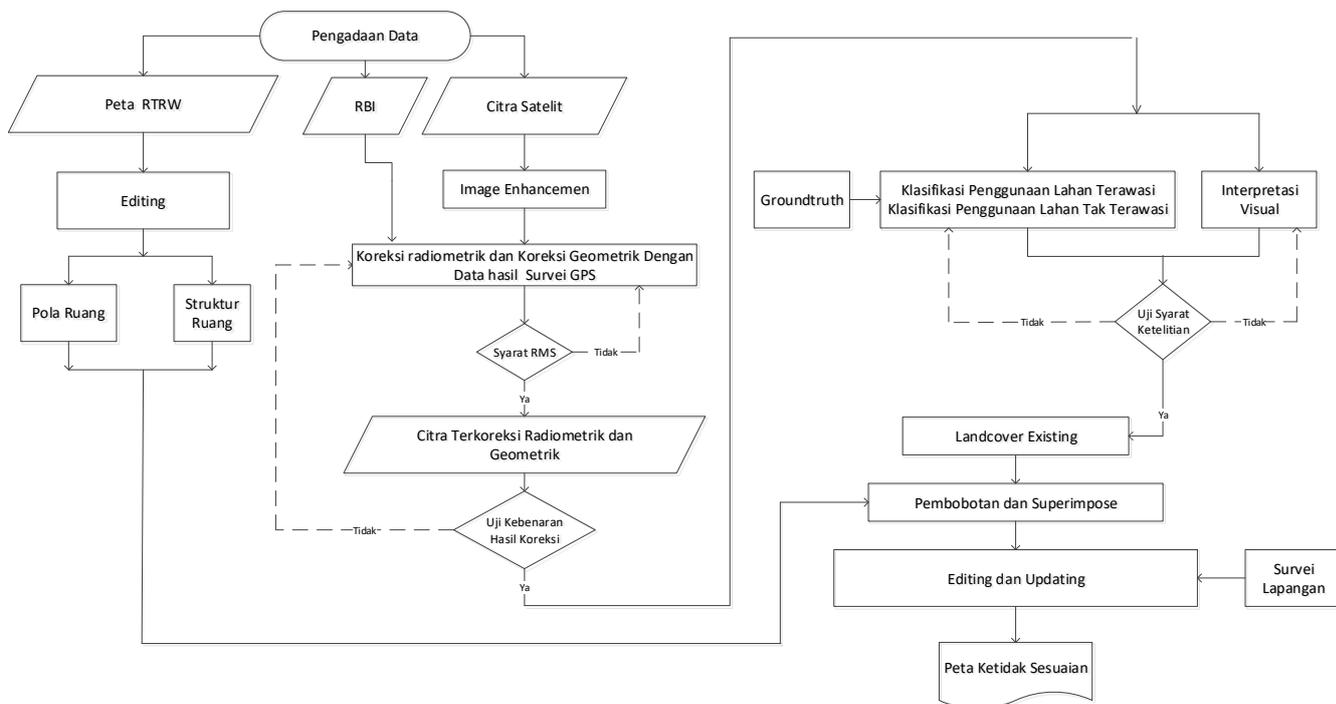
C. Klasifikasi Citra Dengan Metode Supervised Classification dan Unsupervised Classification

Teknik klasifikasi supervised dapat diartikan sebagai teknik klasifikasi yang diawasi. Menurut Projo Danoedoro (1996) klasifikasi supervised ini melibatkan interaksi analisis secara intensif, dimana analisis menuntun proses klasifikasi dengan identifikasi objek pada citra (training area). Sehingga pengambilan sampel perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pola spektral pada setiap panjang gelombang tertentu, sehingga diperoleh daerah acuan yang baik untuk mewakili suatu objek tertentu.

4.3.2. Analisis Overlay Kesesuaian

Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam analisis kesesuaian lahan adalah melakukan overlay antara peta rencana dengan peta kondisi aktual (peta citra satelit terbaru). Hasil overlay ini akan menjadi alat bantu dalam merumuskan kesesuaian, dan tingkat simpangan.

Diagram 4.3: Tahapan Pelaksanaan Analisis Peta Kesesuaian



Teknik Analisis data dilaksanakan melalui *Geography Information System (GIS)* dan *Remote Sensing (Penginderaan Jauh)*.

Secara garis besar tahapan kegiatan terdiri dari (a) Registrasi Citra (b) Pembuatan Peta Citra (c) Interpretasi Citra (d) Klasifikasi Citra (e) Pembentukan Data Spasial penggunaan lahan dan penguasaan lahan. (f) Penyusunan Data Atribut (g) Analisis *overlay* yang meliputi analisis:

1. Analisa perubahan Penggunaan Lahan

Untuk Menghitung dan menentukan perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu tertentu.

Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

- Melakukan *superimpose* Peta Penggunaan lahan baru dan Peta Penggunaan lahan lama.
- Menginventarisasi luas, jenis dan letak perubahan penggunaan lahan pada kurun waktu tertentu untuk menyederhanakan penyajian data, dilakukan reklasifikasi jenis penggunaan lahan.

2. Analisa kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW

Analisa kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dapat menunjukkan kemajuan implementasi tata ruang pada lahan yang telah digunakan untuk berbagai kegiatan. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

Menyusun Matriks Kesesuaian penggunaan lahan terhadap arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan klasifikasi tingkat kesesuaian sebagai berikut:

- *Sesuai*, apabila penggunaan lahan yang ada telah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai contoh, penggunaan lahan sawah pada fungsi kawasan pertanian lahan basah.
- *Tidak Sesuai*, apabila penggunaan lahan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai contoh, keberadaan industri pada fungsi kawasan pertanian lahan basah.

Penentuan tingkat kesesuaian dapat mengacu pada jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk setiap fungsi kawasan dalam dokumen RTRW.

3. Ketersediaan Lahan dalam Tata Ruang

Analisa Ketersediaan Lahan dalam Tata Ruang menunjukkan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang, dengan mempertimbangkan aspek penguasaan dan penggunaan lahan. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

- Melakukan *overlay* (tumpang-tindih) Peta Penggunaan Lahan dan Peta Gambaran Umum Penguasaan Lahan. Lahan-lahan yang penggunaannya belum intensif (non-budidaya) dan/atau belum ada penguasaan lahan skala besar, dianggap masih tersedia.
- Mendeskripsikan luas dan letak lahan-lahan yang tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai RTRW serta lahan-lahan yang tersedia terbatas untuk kegiatan yang berfungsi lindung.
- Terhadap lahan-lahan yang sudah digunakan untuk kegiatan budidaya dan/atau telah ada penguasaan lahan, dianalisa berdasarkan kesesuaiannya dengan RTRW. Apabila penggunaannya sudah sesuai dengan tata ruang, dapat dilakukan berbagai kegiatan

untuk optimalisasi penggunaan lahannya. Apabila penggunaan lahannya belum sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka penyesuaian penggunaan lahan dengan tata ruang. Analisa ini dilakukan melalui *overlay* (tumpang-tindih) lahan-lahan yang dapat dikategorikan tidak tersedia.

- Lahan-lahan yang tersedia tersebut perlu dianalisa peruntukannya berdasarkan arahan tata ruang. Untuk itu, dilakukan *overlay* (tumpang-tindih) lahan-lahan yang masih tersedia dalam Peta Ketersediaan Lahan Indikatif dengan Peta RTRW.
- Mendeskripsikan luas dan letak lahan-lahan yang sudah ada penguasaan lahan (skala besar) dan penggunaan lahan yang sesuai dengan tata ruang dan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
- Untuk menyimpulkan hasil analisa dan menyajikannya secara lebih informatif, hasil analisa pada Peta Ketersediaan Lahan dalam Tata Ruang.

BAB 5 KONDISI PENGGUNAAN LAHAN

5.1 Penggunaan Lahan Lama

5.1.1 Penggunaan Lahan 2012

Penggunaan Lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami buatan manusia (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3). Penggunaan lahan pada masing-masing wilayah akan berbeda tergantung pada kondisi fisik alam dan sosial masyarakatnya. Penggunaan lahan yang paling mudah diamati ada pada wilayah pedesaan dan pusat ibu kota. Penggunaan lahan di pedesaan didominasi untuk pertanian, seperti perkebunan dan sawah, sedangkan penggunaan lahan perkotaan biasanya didominasi oleh perumahan dan jasa/perdagangan. Dari analisa menggunakan GIS, kabupaten Pringsewu memiliki luas \pm 62.511,24 Ha. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rincian sebagai berikut : Kecamatan Adiluwih seluas 7.482,15Ha, Ambarawa seluas 3.099,27Ha, Banyumas seluas 3.984,86Ha, Gadingrejo seluas 8.571,07Ha, Pagelaran seluas 7.247Ha, Pagelaran Utara seluas 10.028Ha, Pardasuka seluas 9.474,42Ha, Pringsewu Seluas 5.329,29Ha, dan Sukoharjo seluas 7.295,16Ha.

Berdasarkan analisis GIS Tahun 2012, penggunaah lahan di Kabupaten Pringsewu paling besar adalah kebun campuran dengan porsi 27,27% dari luas wilayah, atau sekitar 17.047 Ha. Kebun campuran di beberapa desa di Pringsewu di dominasi oleh kebun coklat dan kopi. Emplasement tetap hanya sekitar 6 Ha, yang meliputi beberapa bangunan permanen sepeprti SPBE, SPBU, Gudang dan Lain-lain. Untuk penggunaan lahan pertanian lahan basah seperti sawah, total di Kabupaten Pringsewu memiliki luas sawah kurang lebih 15.000 Ha. Luas ini sangat penting untuk dipertahankan, mengingat kondisi lahan dan topografi yang cocok untuk lahan padi, Pringsewu bisa menjadi salah satu lumbung pangan, terutama untuk menuju kemandirian pangan di Kabupaten sendiri.

Jika dilihat dari kelas lahan terbangun dan tidak terbangun, Kabupaten Pringsewu memiliki Luas Lahan Terbangun sekitar 21 % dari Luas Wilayah. Dengan demikian, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah Kabupaten harus memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas wilayah, maka setiap pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang menggunakan dan mengalih-fungsikan lab.an agar lebih cermat dalam menganalisa dampak lingkungan yang dihasilkan. Sehingga degradasi lahan serta berkurangnya RTH di Kabupaten Pringsewu bisa dikendalikan.

Tabel 5.1 Penggunaan Tanah Kabupaten Pringsewu

Penggunaan Lahan	Luas	%
Emplasement Tetap	6,08	0,01
Hutan Belukar	7.923,83	12,68
Jasa dan Perdagangan	145,98	0,23

Kebun Campuran	17.047	27,27
Pemukiman Jarang	8.969,25	14,35
Pemukiman Padat	4.373,30	7100
Rawa	408,26	0,05
Sawah Irigasi	14.187,63	22,70
Sawah non irigasi	1.313,60	2,20
Semak Belukar	583,74	0,93
Tegalan	7.491,74	11,98
Total	62.511,24	100

Sumber: Analisa GIS 2012, Kanwil BPN Lampung

Tabel 5.2 Rekapitulasi Penggunaan Tanah Per Kecamatan

Kecamatan	Emplasemen Tetap	Hutan Belukar	Jasa/Perdagangan	Kebun Campuran	Pemukiman Jarang	Permukiman Jarang
Adiluwih				545,07	2361,54	
Ambarawa				14,78	113,58	889,40
Banyumas		245,84		2334,61	782,33	
Gadingrejo	3,05		15,74	1883,40	1589,01	986,72
Pagelaran		4516,82	5,99	7632,32	766,34	1055,44
Pardasuka		3015,74		419,06	749,17	
Pringsewu	3,03	145,42	116,08	871,36	288,67	1441,67
Sukoharjo			8,17	3347,22	2318,60	0,08
	6,08	7923,83	145,98	17047,82	8969,25	4373,30

Lanjutan...

Kecamatan	Emplasemen Tetap	Hutan Belukar	Jasa/Perdagangan	Kebun Campuran	Pemukiman Jarang	Permukiman Jarang
Adiluwih		382,61	703,53		3489,41	7482,15
Ambarawa		1680,89	9,21	32,81	358,60	3099,27
Banyumas		217,04	110,71		294,32	3984,86
Gadingrejo		4004,60	69,13		19,41	8571,07
Pagelaran	408,26	1799,79	48,45	13,67	1027,94	17275,00
Pardasuka		2904,49	172,61	537,26	1676,10	9474,42
Pringsewu		1994,65	49,47		418,94	5329,29
Sukoharjo		1203,57	210,51		207,02	7295,16
	408,26	14187,63	1373,60	583,74	7491,74	62511,24

Sumber : Analisa GIS 2012, Kanwil BPN Lampung

Berdasarkan pembagian per kecamatan, Wilayah Kecamatan Adiluwih didominasi oleh Tegalan dengan luas kurang lebih 3.489 Ha. Daerah Adiluwih merupakan kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu, serta berjarak 18 Km dari ibukota Kabupaten.

Kecamatan Ambarawa dengan luas sekitar 3.099 Ha. didominasi oleh pertanian lahan basah, yakni sawah. Sawah di Kecamatan ini memiliki porsi 54% selanjutnya permukiman/kampung dengan porsi 29%. Dengan masih banyaknya lahan belum terbangun di daerah ini, hendaknya pembangunan yang

menyebabkan alih fungsi lahan produktif seperti sawah hendaknya dikendalikan terutama sepanjang jalan utama yang memang mengalami perkembangan paling pesat.

Kebun campuran seluas 2.334 Ha mendominasi penggunaan lahan di Kecamatan Banyumas dengan porsi 63%. Di kecamatan ini hanya memiliki sawah sekitar 9% dari luas wilayah, serta hutan belukar yang menjadi kasawan hutan lindung seluas 245 Ha atau 7% dari luas wilayah kecamatan. Karena kecamatan ini berbatasan langsung dengan hutan lindung, maka pembangunan di daerah ini harus benar-benar memperhatikan batas Rutan Lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kecamatan Banyumas merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, berada di sebelah barat Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan ini memiliki karakteristik banyak pertanian lahan kering, terutama tanaman coklat dan kopi. Untuk itu di daerah ini dalam RTRW banyak diarahkan untuk Perkebunan dan Pertanian Holtikultura.

Kecamatan Gadingrejo merupakan pintu gerbang Kabupaten Pringsewu dari arah selatan yang dilalui jalur lintas barat Provinsi Lampung. Hal ini mengakibatkan jalan utama di kecamatan ini sibuk dengan kendaraan antar provinsi. Dari posisi yang sangat strategis tersebut membuat penggunaan lahan di sepanjang jalan utama dipenuhi dengan pemukiman padat dan jasa. Akses ke Gadingrejo menjadi mudah karena di daerah ini telah dibangun terminal. Posisi terminal tersebut persis berada di sebelah pasar yang akan mempermudah kegiatan perekonomian seperti perdagangan barang dan jasa.

Dari analisa GIS yang dilakukan oleh TIM Penyusunan Neraca SDA, kecamatan Gadingrejo memiliki lahan sawah seluas \pm 4.000 ha atau 48% dari luas wilayah kecamatan. Dilihat dari posisi yang strategis serta akses jalur lintas barat yang sibuk dengan kendaraan, bisa mempercepat alih fungsi lahan pertanian di kecamatan ini. Dengan demikian, alih fungsi lahan yang akan mengurangi lahan pertanian khususnya sawah harus dikendalikan, mengingat salah satu lahan sawah terluas yang ada di Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Gadingrejo.

Kecamatan Pagelaran merupakan pintu terakhir Kabupaten Pringsewu bila kita melakukan perjalanan ke arah utara. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus yang merupakan induk dari Kabupaten Pringsewu. Dari hasil Analisa GIS, kecamatan Pagelaran masih didominasi lahan belum terbangun, dengan komposisi kebun campuran seluas 44% dan hutan belukar seluas 26% dari luas wilayah. Kecamatan ini juga dilalui jalur lintas barat, akan tetapi perkembangan kepadatan permukiman di sepanjang jalan tidak secepat Gadingrejo dan Pringsewu. Di sepanjang jalan utama kecamatan ini masih banyak dijumpai kebun kopi, coklat, sawah dan belukar yang di kuasai oleh masyarakat. Data yang digunakan saat melakukan analisa adalah data RTRW tahun 2011, sehingga kecamatan Pagelaran pada saat itu belum terjadi pemekaran.

Selanjutnya Kecamatan Pardasuka yang berada di bagian selatan Kabupaten Pringsewu. Kecamatan ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran, serta memiliki Pola Ruang RTRW sebagai Hutan Lindung. Hutan belukar yang ada di daerah ini memiliki luas sekitar 4.500 ha atau 32% dari luas wilayah Kecamatan. Beberapa lahan yang merupakan kawasan hutan di kecamatan ini ternyata sudah beralih fungsi menjadi pertanian lahan kering. Hal ini jika dibiarkan berlanjut maka akan terjadi konflik peralihan seperti yang terjadi di daerah lainnya. Karena hutan merupakan kawasan yang harus dijaga, sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk melindungi hutan sehingga bisa menekan laju deforestasi.

Penggunaan lahan di sektor pertanian seperti sawah dan tegalan juga masih banyak terdapat di wilayah ini. Sekitar 30% dari luas wilayah Kecamatan Pagelaran digunakan untuk area persawahan, yang ditunjang dengan banyaknya aliran sungai sehingga memudahkan aliran air untuk kepentingan irigasi. Sedangkan untuk kondisi permukiman di wilayah ini masih merupakan perkampungan atau permukiman jarang. Untuk meningkatkan perekonomian dan akses dari masyarakat Pardasuka, akan lebih baik jika utilitas seperti jalan diperbaiki dan diperlebar.

Ibu kota Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Pringsewu, dengan Kantor Bupati terletak di pinggir jalan utama yang berada di utara pasar pringsewu. Daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Pringsewu, dimana telah banyak berdiri pusat perbelanjaan seperti Chandra Supermarket. Sehingga bisa dilihat kecamatan ini sangat sibuk dengan kegiatan jasa dan perdagangan di pusat kota.

Dari hasil analisa GIS, Kecamatan Pringsewu masih memiliki lahan sawah kurang lebih 2.000 ha atau seluas 38% dari luas kecamatan. Lahan sawah irigasi masih bisa dilihat di sepanjang jalan utama menuju Kota Agung, akan tetapi secara perlahan sawah tersebut beralih fungsi menjadi permukiman, khususnya untuk jasa dan perdagangan. Tanah di Kecamatan Pringsewu selanjutnya banyak digunakan untuk permukiman. Pembangunan fisik di Kabupaten Pringsewu memang banyak di daerah ini mengingat merupakan ibukota pemerintahan dan pusat perekonomian. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah laju pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan lahannya. Hal ini untuk menekan laju kerusakan lahan, serta untuk membangun Pringsewu dengan rapi sesuai dengan RTRW yang telah disahkan. Secara porsi, lahan permukiman padat dan perkampungan di kecamatan ini memiliki luas kurang lebih 32% dari luas wilayah kecamatan.

Untuk Kecamatan Sukoharjo, penggunaan tanah terbesar adalah kebun campuran seluas ± 3.300 Ha atau 46% dari wilayah kecamatan, serta penggunaan tanah untuk jasa dan perdagangan yang meliputi pasar sukoharjo dan sekitarnya seluas 8 Ha. Sebagian besar kebun campuran di kecamatan sukoharjo dimanfaatkan untuk tanaman coklat, kopi dan beberapa tegalan untuk singkong (ubi kayu).

Di beberapa desa di Kecamatan Sukoharjo ada beberapa lahan yang dijadikan area untuk penambangan tanah liat. Tanah liat tersebut mereka manfaatkan untuk pembuatan bahan baku bangunan seperti genteng dan batu

bata. Untuk meningkatkan akses dan perekonomian masyarakat sukoharjo, seharusnya dibangun jembatan yang menghubungkan antara ada di Desa Pandansari selatan dengan Gadingrejo yang dipisahkan oleh sungai. Jika jembatan tersebut dibangun. otomatis akses masyarkat sukoharjo untuk keluar wilayah menuju Bandar Lampung tidak harus memutar ke arah Pringsewu, akan tetapi bisa langsung tembus ke Gadingrejo.

Penggunaan lahan yang penting dipertahankan adalah sawah yang meliputi 38% dari luas wilayah kecamatan. Beberapa sawah di daerah ini mengandalkan irigasi dari siring yang dibuat oleh masyarakat, ada juga sawah yang mengandalkan hujan dari alam. Sawah di kecamatan ini perlu dijaga, karena lahan sawah produktif di Pulau Jawa yang merupakan pulau ter subur di Indonesia justru mengalami alih fungsi lahan yang tragis karena pembangunan fisik yang sangat pesat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan dan lumbung padi regional. Lahan yang subur dan cocok untuk tanaman coklat, bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perkebunan coklat secara komprehensif dan lebih profesional. untuk pembangunan sosial budaya, Masayarat Pringsewu juga merupakan masyarakat terdidik dilihat dari banyaknya sekolah tinggi yang telah berdiri disini.

5.1.2 Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan lahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2).

Di Kabupaten Pringsewu hanya terdapat 2 (dua) jenis penguasaan lahan yakni Kawasan Hutan Lindung serta lahan hak UUPA dan perorangan. Total luas kawasan hutan lindung di Kabupaten ini adalah 10.574,62 Ha yang tersebar di kecamatan Pardasuka seluas 1.879,48Ha, dan sisanya berada di Kecamatan Pagelaran. Selain kedua kecamatan tersebut, penguasaan yang ada adalah lahan yang telah terdaftar sesuai dengan hak UUPA dan lahan yang dikuasai perorangan dengan luas 51.936,62 Ha. Dengan belum adanya penguasaan lahan skala besar di Kabupaten Pringsewu, seperti HOU Perkebunan, maka pembangunan fisik di wilayah ini bisa diakomodir dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 5.3 Gambaran Umum Penguasaan Tanah

GAMBARAN UMUM PENGUASAAN LAHAN	LUAS (Ha)	%
Hutan Lindung	10.574,62	16,92
Lahan hak UUPA dan Perorangan	51.936,62	83,08
	62.511,24	100,00

Sumber : Analisis GIS 2012, Kanwil BPN Lampung

Tabel 5.4 Tabel Gambaran Umum Penguasaan Tanah Perkecamatan

Kecamatan	Data Lindung	Lahan Hak UUPA dan Perorangan	Total
ADILUWIH		7482,15	7482,15
AMBARAWA		3099,27	3099,27
BANYUMAS		3984,86	3984,86
GADINGREJO		8571,07	8571,07
PAGELARAN	8695,15	8579,86	17275,00
PARDASUKA	1879,48	7594,94	9474,42
PRINGSEWU		5329,29	5329,29
SUKOHARJO		7295,16	7295,16
	10574,62	51936,62	62511,24

Sumber : Analisis GIS 2012, Kanwil BPN Lampung

5.2 Pola Ruang RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031

Tata ruang merupakan suatu perencanaan yang didasarkan pada beberapa kriteria baik yang ada pada saat ini maupun yang akan datang sehingga didapat suatu fungsi kawasan yang dianggap ideal untuk pengembangan ruang di daerah tersebut. Fungsi kawasan ini mempunyai jangka tertentu yang dapat ditinjau kembali setelah beberapa tahun biasanya 5 tahun sekali.

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dengan menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung tersebut.

Pola ruang wilayah merupakan bentuk hubungan antar berbagai aspek sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial-budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika lingkungan, dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang.

Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: "Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya". Dengan demikian, penataan ruang ini mengacu pada fungsi utama kawasan. Antara lain meliputi komponen dalam penataan ruang yang berdasar pada wilayah administrasi, kegiatan kawasan, maupun dalam nilai strategis kawasan. Selanjutnya pada pasal 20 ayat (2), menetapkan rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

5.2.1 Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan suaka alam. Yang termasuk sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

Penataan kawasan lindung di Kabupaten Pringsewu terdiri atas

1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya.

Berdasarkan hasil analisis, kawasan hutan lindung di Kabupaten Pringsewu diarahkan pada wilayah-wilayah dengan kemiringan diatas 40% yang terdapat di bagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di bagian Barat Laut (Kecamatan Pagelaran) Kabupaten Pringsewu.

Termasuk kedalam kawasan ini adalah: Sebagian Rutan Lindung Register 21 Perentian Batu (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pardasuka) seluas 2.667,96 Ha. Sebagian Rutan Lindung Register 22 Way Waya (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pagelaran) seluas 8.345,61 Ha. Luas total kawasan lindung eksisting mencapai 11.013,57 atau sebesar 17,62% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Pada kenyataannya kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Pringsewu belum mampu melindungi kawasan dibawahnya. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya penggunaan lahan pertanian di kawasan yang lahannya peka terhadap erosi dan kemiringannya lebih dari 40% serta kurangnya lahan untuk kawasan yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya. Akibatnya pada saat musim hujan lahan sangat mudah tergerus dan menghasilkan longsor yang selain merusak kawasan budidaya yang ada dibawahnya. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali adalah dengan mengembalikan fungsi lindung pada kawasan dengan kemiringan lebih dari 40%. Selain itu, daerah yang telah longsor ditanami kembali dengan tanaman-tanaman besar yang mampu mencegah terjadinya erosi lahan pada musim hujan dan juga mengurangi aktivitas pertanian di daerah rawan longsor, sehingga luas kawasan lindung dapat bertambah.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya. Luas kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Pringsewu yaitu 4.334,25 Ha atau sekitar 6,93% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari:

- a. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1992, Pasal 1 ayat 7). Kawasan tersebut dibatasi oleh garis berjarak tertentu ke arah daratan dari garis permukaan air sungai pada saat debit normal. Pengelolaan sempadan sungai/kanal/saluran irigasi primer perlu dilakukan se-dini mungkin secara tegas, sebelum terlanjur menjadi kompleks permasalahan-nya, terutama yang berada di wilayah permukiman. Berkaitan dengan itu, juga aspek pencemaran terhadap sungai/kanal/saluran irigasi

primer perlu sekaligus ditangani. Pelestarian sempadan sungai di bagian hulu dapat dikaitkan dengan program pelestarian kawasan sekitar mata air, karena kedua wilayah tersebut menyambung.

- b. Kawasan Mata Air adalah kawasan di sekeliling waduk/mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air (Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1992, Pasal 1 ayat 9). Mata air merupakan sumber air sangat penting karena merupakan penyedia air tawar, baik yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai air bersih, maupun untuk keperluan lainnya (pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan sebagainya.) melalui sungai yang mengalirkannya. Pelestarian kawasan sekitar mata air sangat penting untuk menjaga agar mata air dapat terus mengalirkan air, terutama pada musim kemarau. Untuk itu, kawasan sekitar mata air harus masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan yang dilindungi yang dikuatkan dengan peraturan perundangan. Data mengenai mata air perlu tersedia, baik mengenai lokasinya, debitnya (terutama pada musim kemarau), sungai yang mengalirkannya, pemanfaatannya sekarang dan perkiraannya di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan pengembangan wilayah yang akan menggunakan air dari sumber tersebut. Juga data lain yang terkait seperti iklim mikro di kawasan sekitar mata air dan wilayah yang memanfaatkannya. Kawasan lindung waduk dan mata air di Kabupaten Pringsewu terdapat di semua kawasan lindung.

3. Kawasan Rawan Bencana

Pola pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana merupakan pengaturan pemanfaatan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana merupakan salah satu kriteria yang akan dijadikan dasar untuk menentukan lokasi pembangunan permukiman penduduk di wilayah Kabupaten Pringsewu. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Pringsewu daerah rawan bencana terdiri atas:

a. Daerah Rawan Banjir

Terjadinya banjir merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat kerusakan hutan dan kurang teraturnya pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pringsewu. Daerah yang teridentifikasi sebagian daerah rawan banjir terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu : Pardasuka, Sukoharjo, Pringsewu dan Adi Luwih.

b. Daerah rawan kebakaran hutan

Daerah-daerah yang termasuk kedalam rawan kebakaran hutan meliputi wilayah disekitar kawasan hutan di Kabupaten Pringsewu, yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka. Terjadinya kebakaran hutan ini umumnya akibat pembukaan ladang baru dengan cara yang tidak benar yaitu dengan pembakaran hutan. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan ini adalah mengembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.

c. Daerah rawan bencana lahan longsor

Daerah ini teridentifikasi di wilayah yang tingkat kerusakan kawasan hutan yang cukup tinggi, dan terletak pada kemiringan lahan lebih dari 40%, dimana umumnya kondisi lahan pada kawasan ini relatif buruk dengan permeabilitas (daya resap air) tinggi, yaitu disekitar wilayah Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Pagelaran. Bentuk penanggulangan daerah rawan bencana ini adalah melalui kegiatan penghijauan.

5.2.2 Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Pringsewu, terdiri dari: Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering dan Perkebunan.

1. Kawasan Hutan Produksi

Pemanfaatan ruang bagi hutan produksi (HP) dilakukan dengan melihat ketersediaan lahan yang ada saat. Kawasan hutan-hutan rakyat di wilayah Kabupaten Pringsewu ini dapat dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pringsewu memiliki luasan sekitar 4.434,28 Ha atau sekitar 7,09% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu,

Dalam 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030, pemanfaatan sumberdaya hutan diproyeksikan mengalami perubahan yang cukup berarti dengan tetap berpegang pada azas hutan lestari dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan serta perubahan paradigma dari pemanfaatan kayu hutan menjadi pemanfaatan non-kayu. Namun demikian, perkembangan wilayah Kabupaten Pringsewu yang pesat dan membutuhkan banyak lahan untuk dapat dikembangkan sebagai lahan budidaya, akan berpengaruh terhadap luasan pemanfaatan Hutan Produksi kedepannya. Karena bisa saja terjadi masyarakat menggunakan lahan Hutan Produksi sebagai alternatif pemenuhan akan kebutuhan lahan budidaya.

2. Kawasan Pertanian

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, maka diketahui luas lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pertanian lahan basah adalah sekitar 12.173,38 Ha atau sekitar 19,47% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Lahan yang berpotensi tersebut tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut dimungkinkan mengingat bahwa pada topografi wilayah di Kabupaten Pringsewu sebagian besar adalah relatif datar dan landai, sehingga sangat mendukung tersedianya ruang untuk pengembangan pertanian lahan basah. Ruang yang diperuntukkan bagi pertanian lahan basah tersebut dominan tersebar di wilayah Timur, Barat dan Selatan Kabupaten Pringsewu. Jenis tanaman yang dikembangkan meliputi padi sawah.

Pengembangan pertanian lahan basah dimasa yang akan datang tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan mengenai pengembangan Lahan Sawah Lestari/ Abadi oleh Pemerintah Daerah mengingat Kabupaten Pringsewu sebagai lumbung pangan baik untuk Kabupaten Pringsewu maupun Provinsi Lampung. Lahan Sawah Lestari/ Abadi sangat erat hubungannya dengan ketahanan pangan. Dimana pada zaman sekarang ini ketahanan pangan tidak lagi dapat dipenuhi atas usaha perorangan atau perkeluarga saja. melainkan dicapai melalui usaha-usaha kolektif. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Lokasi lahan sawah abadi ditetapkan pada setiap lab.an sawah yang pada saat ini diairi oleh sistem irigasi teknis maka sampai dengan 20 tahun mendatang akan dipertahankan sebagai lahan sawah.

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan serta perkembangan sarana dan prasarana perkotaan di Kabupaten Pringsewu berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lab.an. Konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan salah satu penyebab semakin berkurangnya luas sawah. Dengan demikian sebelum dilakukan konversi harus dilakukan pengkajian-pengkajian yang dapat menekan lebih tingginya alih fungsi lahan.

Untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang pengembangan pertanian lahan basah dilakukan secara terpadu dengan kegiatan perternakan dan perikanan. Dimana berdasarkan luasan lahan sawah beririgasi teknis pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu direncanakan sampai dengan tahun 2028 luasan tersebut tidak berkurang, sebaliknya semakin bertambah kecuali di Kecamatan Pringsewu.

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering

Rencana pengembangan pertanian lahan kering dengan jenis komoditi unggulan yang dikembangkan adalah Jagung dan Ubi Kayu. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu ini mencapai luas 3.995,03 Ha atau sekitar 6,39% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Rencana pengembangan komoditas unggulan terhadap harus ditelusuri melalui studi khusus dan diharapkan sebagai bahan baku kegiatan agro industri diwilayah Kabupaten Pringsewu ini dimasa yang akan datang.

c. Kawasan Tanaman Tahunan atau Perkebunan

Pola pemanfaatan ruang bagi kawasan perkebunan dalam konsep supply ruang ini dilakukan berdasarkan metode kesesuaian lahan. Di Kabupaten Pringsewu dapat diklasifikasikan dalam kelas sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai. Pola pemanfaatan ruang bagi perkebunan diambil pada

kelas sangat sesuai dan sesuai. Namun dari hasil analisis lahan yang sangat sesuai dan sesuai bagi perkebunan juga sesuai untuk pertanian tanaman pangan (lahan kering).

Oleh karena itu disamping arahan pemanfaatan bagi lahan perkebunan dan lahan pertanian, juga diberikan arahan pola pemanfaatan ruang bagi perkebunan sekaligus pertanian tanaman pangan (lahan kering). Hal ini dilakukan untuk tidak membatasi arah investasi yang lebih diminati pada lahan yang sesuai untuk lebih dari satu aktivitas. Jenis komoditi tanaman tahunan ini meliputi kopi, kelapa, lada dan kakao. Luas lahan untuk perkebunan ini adalah 17.442,11 Ha atau sekitar 27,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu, yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecuali Kecamatan Ambarawa.

d. Kawasan Pertambangan

Jenis komposit bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Pringsewu meliputi bahan galian golongan B dan golongan C. Jenis bahan galian yang termasuk golongan B diantaranya adalah pasir besi, batu besi, dan emas. Sedangkan bahan tambang/galian golongan C diantaranya sirtu, pasir, pasir kuarsa, kaolin dan lain-lain.

e. Kawasan Peruntukkan Industri

Kawasan pengembangan industri di wilayah Kabupaten Pringsewu direncanakan menjadi peruntukkan bagi kegiatan industri kecil/rumah tangga dan industri menengah.

Pembentukan Kawasan Industri, sebenarnya dapat menjawab hambatan-hambatan tersebut. Alokasi industri-industri dalam suatu kawasan yang terpadu memberi manfaat dan keuntungan-keuntungan baik bagi investor maupun pemerintah sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi di pasaran. Penggunaan infrastruktur produksi dan fasilitas pasca produksi (Galan utama, bandara, terminal, pergudangan, listrik/gas, air, instalasi pengolahan limbah, dan lain-lain) secara bersama-sama akan mengurangi biaya produksi masing-masing industri. Demikian juga keuntungan-keuntungan skala (scale of economies) akan mampu merangsang tumbuhnya industri-industri pemasok dalam skala yang lebih kecil.

Pada muaranya nanti, akan tercipta multiplier effect yang besar terhadap kegiatan-kegiatan lain terutama perdagangan dan jasa. Bagi pemerintah, berkumpulnya industri dalam suatu kawasan industri akan memudahkan dalam pemberian pelayanan/fasilitas penunjang serta memudahkan kontrol terhadap keseluruhan industri, terutama kontrol terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan (Industri Polutan).

f. Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Pola pengembangan perumahan/permukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman, terlebih dengan semakin

banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk. Pengembangan kawasan permukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk permukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan permukiman. Identifikasi kawasan dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan permukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan permukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang.

5.3 Kondisi Penggunaan Lahan Baru

Total luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah seluas 62.510 Ha, dengan penggunaan lahan yang beraneka ragam. Penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi enam bagian yaitu, lahan non pertanian, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, lahan hutan, dan lainnya yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu.

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					
		Non	Sawah	Lahan	Perkebunan	Hutan	Lainnya
1	Pardasuka	359	2.484	1.041	1.292	3.900	398
2	Ambarawa	633	1.390	1.044	-	-	32
3	Pagelaran	1.130	1.384	3.198	4.878	6.540	146
4	Pringsewu	1.428	2.192	1.372	183	46	107
5	Gadingrejo	2.127	2.556	2.138	1.654	-	96
6	Sukoharjo	2.145	1.020	1.446	2.589	-	94
7	Banyumas	608	320	1.483	1.392	148	35
8	Adiluwih	1.118	850	5.505	-	-	9
	Jumlah		12.196	17.227	11.988	10.634	917

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2016.

Berdasarkan diatas, diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah lahan kering atau tegalan yaitu seluas 17.227 hektar. Luas lahan yang digunakan untuk lahan kering atau tegalan 31,95% berada di Kecamatan Adiluwih, sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Seluas 12.196 hektar lahan di Kabupaten Pringsewu digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.988 hektar, hutan seluas 10.634 hektar dan non pertanian seluas 9.548 hektar.

a. Kecamatan Pardasuka

Tabel 5.6 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Pardasuka Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Pardasuka	Non pertanian	359	3.79
	Sawah	2484	26.22
	Lahan kering	1041	10.99
	Perkebunan	1292	13.64

	Hutan	3900	41.17
	Lainnya	398	4.20

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

b. Kecamatan ambarawa

Tabel 5.7 Penggunaan Lahan Kecamatan Ambarawa Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Ambarawa	Non pertanian	633	20.43
	Sawah	1390	44.85
	Lahan kering	1044	33.69
	Perkebunan		
	Hutan		
	Lainnya	32	1.03

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

c. Kecamatan Pagelaran

Tabel 5.8 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan pagelaran Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Pagelaran	Non pertanian	1130	6.54
	Sawah	1384	8.01
	Lahan kering	3198	18.51
	Perkebunan	4878	28.24
	Hutan	6540	37.86
	Lainnya	146	0.85

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

d. Kecamatan Pringsewu

Tabel 5.9 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Pringsewu Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Pringsewu	Non pertanian	1428	26,80
	Sawah	2192	41,14
	Lahan kering	1372	25,75
	Perkebunan	183	3,43
	Hutan	46	0,86
	Lainnya	107	2,01

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

e. Kecamatan Gading Rejo

Tabel 5.10 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Gading Rejo Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Gading Rejo	Non pertanian	2127	24,82
	Sawah	2556	29,82
	Lahan kering	2138	24,94
	Perkebunan	1654	19,30
	Hutan		
	Lainnya	96	1,12

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

f. Kecamatan Sukoharjo

Tabel 5.11 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Sukoharjo	Non pertanian	2145	29,41
	Sawah	1020	13,98
	Lahan kering	1446	19,82
	Perkebunan	2589	35,49
	Hutan		0,00
	Lainnya	94	1,29

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

g. Kecamatan Banyumas

Tabel 5.12 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Banyumas Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Banyumas	Non pertanian	608	15,25
	Sawah	320	8,03
	Lahan kering	1483	37,21
	Perkebunan	1392	34,92
	Hutan	148	3,71
	Lainnya	35	0,88

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

h. Kecamatan Adi Luwih

Tabel 5.13 Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Adi Luwih Tahun 2016

Kecamatan	Penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	%
Adi Luwih	Non pertanian	1118	14,94
	Sawah	850	11,36
	Lahan kering	5505	73,58
	Perkebunan		
	Hutan		
	Lainnya	9	0,12

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2016

i. Kecamatan Pagelaran Utara

Kecamatan Pagelaran Utara merupakan Kecamatan yang baru terbentuk pada tanggal 30 Agustus tahun 2012. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara di Kabupaten Pringsewu. Berlandaskan Peraturan Daerah ini maka dibentuk Kecamatan Pagelaran Utara di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pagelaran Utara sendiri berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagelaran. Sebagai Kecamatan baru, Kecamatan ini belum memiliki data tersendiri dan masih menginduk ke data Kecamatan Pagelaran.

BAB 6

ANALISIS PENATAGUNAAN LAHAN

6.1. Analisa Perubahan Penggunaan lahan

Pada saat dilakukan kajian neraca sumberdaya alam tahun 2017, di Kabupaten Pringsewu terdapat penggunaan lahan berupa belukar 491 ha, Hutan 12.917 ha, dan Perkebunan 12.425 ha, Pemukiman 8.752 ha, sawah 12.183 ha, tegalan 17.364 ha dan Sungai-Air-Rawa 496 ha. Secara keseluruhan penggunaan lahan tersebar disetiap kecamatan namun pada masing-masing wilayah akan berbeda tergantung pada kondisi fisik alam dan kondisi masyarakat.

Penggunaan lahan yang paling mudah diamati ada pada wilayah pedesaan dan pusat ibu kota. Penggunaan lahan di pedesaan didominasi untuk pertanian, seperti perkebunan dan sawah, sedangkan penggunaan lahan perkotaan biasanya didominasi oleh perumahan dan jasa/perdagangan.

Dari analisis citra satelit dan digitasi menggunakan GIS, Kabupaten Pringsewu memiliki luas ± 64.628 Ha. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rincian sebagai berikut: Kecamatan Adiluwih seluas 7.237 Ha, Ambarawa seluas 3.742 Ha, Banyumas seluas 4.813 Ha, Gadingrejo seluas 6.828 Ha, Pagelaran seluas 4.357 Ha, Pagelaran Utara seluas 16.546 Ha,, Pardasuka seluas 11.626 Ha, Pringsewu seluas 4.452 Ha, dan Sukoharjo seluas 5.028 Ha.

Berdasarkan data RTRW kabupaten Pringsewu tahun 2011, penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 Paling besar adalah tegalan dengan porsi 27 % dari luas wilayah atau sekitar 17.364 Ha. Untuk penggunaan lahan pertanian lahan basah seperti sawah, total di Kabupaten Pringsewu memiliki luas sawah kurang lebih 12.183 Ha. Luas ini sangat penting untuk dipertahankan, mengingat kondisi lahan dan topografi yang cocok untuk lahan padi, Pringsewu bisa menjadi salah satu lumbung pangan, terutama untuk menuju kemandirian pangan di Kabupaten sendiri.

Jika dilihat dari kelas lahan terbangun dan tidak terbangun, Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan terbangun sekitar 13% dari luas wilayah. Dengan demikian, berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah Kabupaten harus memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas wilayah, maka setiap pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang menggunakan dan mengalih fungsikan lahan agar lebih cermat dalam menganalisa dampak lingkungan yang dihasilkan. Sehingga degradasi lahan serta berkurangnya RTH di Kabupaten Pringsewu bisa dikendalikan.

Berdasarkan pembagian per kecamatan, Wilayah Kecamatan Adiluwih didominasi oleh tegalan dngan luas kurang lebih 3489 Ha. Daerah Adiluwih merupakan kecamatan terluar yang beerbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu, serta berjarak 18Km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Ambarawa dengan luas sekitar 3741.675 Ha. didominasi oleh pertanian lahan basah, yakni sawah. Sawah di Kecamatan ini memiliki porsi 45% selanjutnya permukiman/kampung dengan porsi 20%. Dengan

masih banyaknya lahan belum terbangun di daerah ini, hendaknya pembangunan yang menyebabkan alih fungsi lahan produktif seperti sawah hendaknya dikendalikan terutama sepanjang jalan utama yang memang mengalami perkembangan paling pesat.

Tegalan dan Kebun campuran seluas 3.472,2 Ha mendominasi penggunaan lahan di Kecamatan Banyumas dengan porsi 72%. Di kecamatan ini hanya memiliki sawah sekitar 8% dari luas wilayah, serta hutan belukar yang menjadi kasawan hutan lindung seluas 178,33 Ha atau 4% dari luas wilayah kecamatan. Karena kecamatan ini berbatasan langsung dengan hutan lindung, maka pembangunan di daerah ini harus benar-benar memperhatikan batas Rutan Lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kecamatan Banyumas merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, berada di sebelah barat Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan ini memiliki karakteristik banyak pertanian lahan kering, terutama tanaman coklat dan kopi. Untuk itu di daerah ini dalam RTRW banyak diarahkan untuk Perkebunan dan Pertanian Holtikultura.

Kecamatan Gadingrejo merupakan pintu gerbang Kabupaten Pringsewu dari arah selatan yang dilalui jalur lintas barat Provinsi Lampung. Hal ini mengakibatkan jalan utama di kecamatan ini sibuk dengan kendaraan antar provinsi. Dari posisi yang sangat strategis tersebut membuat penggunaan lahan di sepanjang jalan utama dipenuhi dengan pemukiman padat dan jasa. Akses ke Gadingrejo menjadi mudah karena di daerah ini telah dibangun terminal. Posisi terminal tersebut persis berada di sebelah pasar yang akan mempermudah kegiatan perekonomian seperti perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan data RTRW kecamatan Gadingrejo memiliki lahan sawah seluas 2036.223 ha atau 30% dari luas wilayah kecamatan. Dilihat dari posisi yang strategis serta akses jalur lintas barat yang sibuk dengan kendaraan, bisa mempercepat alih fungsi lahan pertanian di kecamatan ini. Dengan demikian, alih fungsi lahan yang akan mengurangi lahan pertanian khususnya sawah harus dikendalikan, mengingat salah satu lahan sawah terluas yang ada di Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Gadingrejo.

Kecamatan Pagelaran merupakan pintu terakhir Kabupaten Pringsewu bila kita melakukan perjalanan ke arah utara. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus yang merupakan induk dari Kabupaten Pringsewu. Kecamatan ini juga dilalui jalur lintas barat, akan tetapi perkembangan kepadatan permukiman di sepanjang jalan tidak secepat Gadingrejo dan Pringsewu. Di sepanjang jalan utama kecamatan ini masih banyak dijumpai kebun kopi, coklat, sawah dan belukar yang di kuasai oleh masyarakat. Sekitar 30% dari luas wilayah Kecamatan Pagelaran digunakan untuk area persawahan, yang ditunjang dengan banyaknya aliran sungai sehingga memudahkan aliran air untuk kepentingan irigasi. Sedangkan untuk kondisi permukiman di wilayah ini masih merupakan perkampungan atau permukiman jarang. Untuk meningkatkan perekonomian dan akses dari masyarakat Pardasuka, akan lebih baik jika utilitas seperti jalan diperbaiki dan diperlebar.

Dari hasil Analisa GIS 2017, kecamatan Pagelaran utara masih didominasi lahan belum terbangun, dengan komposisi kebun campuran seluas 34.81% dan hutan belukar seluas 47.12% dari luas wilayah. Data yang digunakan saat melakukan analisa adalah data RTRW tahun 2011 saat itu belum terjadi pemekaran pagelaran Utra, sehingga kecamatan Pagelaran Utara menggunakan data eksisting 2017.

Selanjutnya Kecamatan Pardasuka yang berada di bagian selatan Kabupaten Pringsewu. Kecamatan ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran, serta memiliki Pola Ruang RTRW sebagai Hutan Lindung. Hutan belukar yang ada di daerah ini memiliki luas sekitar 4786.9ha atau 41% dari luas wilayah Kecamatan. Beberapa lahan yang merupakan kawasan hutan di kecamatan ini ternyata sudah beralih fungsi menjadi pertanian lahan kering. Hal ini jika dibiarkan berlanjut maka akan terjadi konflik perlahan seperti yang terjadi di daerah lainnya. Karena hutan merupakan kawasan yang harus dijaga, sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk melindungi hutan sehingga bisa menekan laju deforestasi. Penggunaan lahan di sektor pertanian seperti sawah dan tegalan juga masih banyak terdapat di wilayah ini.

Kecamatan Pringsewu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Pringsewu, dimana telah banyak berdiri pusat perbelanjaan seperti Supermarket. Sehingga bisa dilihat kecamatan ini sangat sibuk dengan kegiatan jasa dan perdagangan di pusat kota. Dari data RTRW 2011, Kecamatan Pringsewu masih memiliki lahan sawah 1831.548 ha atau seluas 41% dari luas kecamatan. Lahan sawah irigasi masih bisa dilihat di sepanjang jalan utama Lintas Barat, akan tetapi secara perlahan sawah tersebut beralih fungsi menjadi permukiman, khususnya untuk jasa dan perdagangan. Tanah di Kecamatan Pringsewu selanjutnya banyak digunakan untuk permukiman. Pembangunan fisik di Kabupaten Pringsewu memang banyak di daerah ini mengingat merupakan ibukota pemerintahan dan pusat perekonomian. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah laju pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan lahannya. Hal ini untuk menekan laju kerusakan lahan, serta untuk membangun Pringsewu dengan rapi sesuai dengan RTRW yang telah disahkan. Secara porsi, lahan permukiman padat dan perkampungan di kecamatan ini memiliki luas kurang lebih 27% dari luas wilayah kecamatan.

Untuk Kecamatan Sukoharjo, penggunaan tanah terbesar adalah kebun campuran seluas 1784.513 Ha atau 36% dari wilayah kecamatan, serta penggunaan tanah untuk permukiman dan jasa dan perdagangan yang meliputi pasar sukoharjo dan sekitarnya 29%. Di beberapa desa di Kecamatan Sukoharjo ada beberapa lahan yang dijadikan area untuk penambangan tanah liat. Tanah liat tersebut mereka manfaatkan untuk pembuatan bahan baku bangunan seperti genteng dan batu bata. Untuk meningkatkan akses dan perekonomian masyarakat sukoharjo, seharusnya dibangun jembatan yang menghubungkan antara ada di Desa Pandansari selatan dengan Gadingrejo yang dipisahkan oleh sungai. Jika jembatan tersebut dibangun. otomatis akses masyarakat sukoharjo untuk keluar wilayah menuju Bandar Lampung tidak harus memutar ke arah Pringsewu, akan tetapi bisa langsung tembus ke Gadingrejo. Penggunaan lahan yang penting

dipertahankan adalah sawah yang meliputi 14% dari luas wilayah kecamatan. Beberapa sawah di daerah ini mengandalkan irigasi dari siring yang dibuat oleh masyarakat, ada juga sawah yang mengandalkan hujan dari alam. Sawah di kecamatan ini perlu dijaga, karena lahan sawah produktif di Pulau Jawa yang merupakan pulau subur di Indonesia justru mengalami alih fungsi lahan yang tragis karena pembangunan fisik yang sangat pesat.

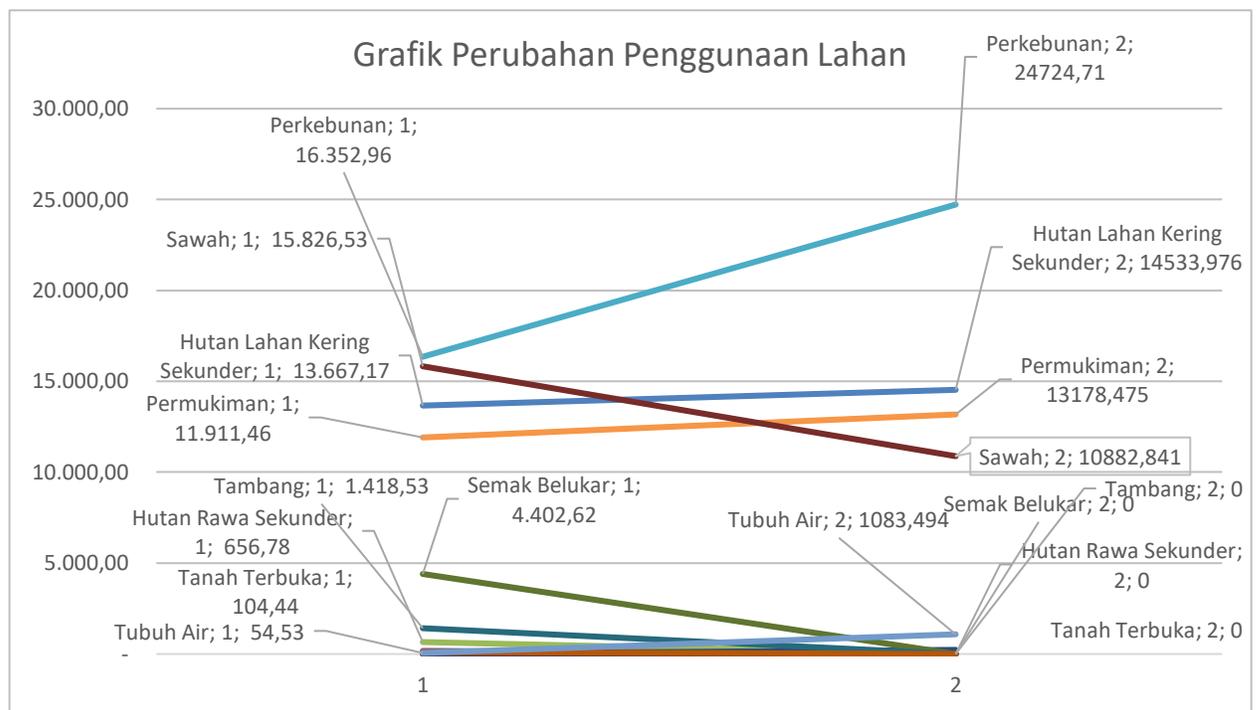
Secara keseluruhan, Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan dan lumbung padi regional. Lahan yang subur dan cocok untuk tanaman coklat, bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perkebunan coklat secara komprehensif dan lebih profesional. Untuk pembangunan sosial budaya, Masyarakat Pringsewu juga merupakan masyarakat terdidik dilihat dari banyaknya sekolah tinggi yang telah berdiri disini.

Selama kurun waktu 5 tahun (2011-2017) tidak banyak mengalami perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu. Pola perubahan penggunaan lahannya bersifat sporadik dan parsial yang di data melalui pertimbangan Teknis Perlahanan baik untuk Izin Perubahan Penggunaan lahan maupun untuk Izin Lokasi. Perubahan penggunaan lahan paling mudah diperhatikan adalah sepanjang jalan lintas Barat yang banyak berubah menjadi ruko dan pertokoan.

Berdasarkan data neraca, Perubahan penggunaan lahan sawah pada tahun 2017 seluas 15.823,41Ha menurun menjadi 10.879,727 Ha pada tahun 2017. Laju penurunan lahan sawah perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Kabupaten Lampung Tengah wajib mengalokasikan lahan kurang lebih seluas 8.000 Ha untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

NO	DATA AKTIVA		DATA PASIVA		PERUBAHAN (HA)	
	KEADAAN AWAL	LUAS (HA)	KEADAAN EXISTING	LUAS (HA)	(+)	(-)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	13.667,17	Hutan Lahan Kering Sekunder	14.533,976	866,802	
2	Hutan Mangrove Sekunder	33,47	Hutan Mangrove Sekunder			33,470
3	Hutan Rawa Sekunder	656,78	Hutan Rawa Sekunder			656,780
4	Hutan Tanaman Industri	172,99	Hutan Tanaman Industri			172,985
5	Perkebunan	16.352,96	Perkebunan	24.724,710	8.371,752	
6	Permukiman	11.911,46	Permukiman	13.178,475	1.267,012	
9	Savana	4,70	Savana	226,364	221,662	
10	Sawah	15.826,53	Sawah	10882,841	(4.943,684)	
11	Semak Belukar	4.402,62	Semak Belukar			4.402,617
12	Sungai	25,25	Sungai			25,249
13	Tambang	1.418,53	Tambang			1.418,528
14	Tanah Terbuka	104,44	Tanah Terbuka			104,435
15	Tubuh Air	54,53	Tubuh Air	1.083,494	1.028,963	

Tabel 6.1. Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Lahan



Grafik 6.1. Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Lahan

Perkebunan pada tahun 2017 naik seluas 24.724,71Ha, dari luas 16.352,958 Ha di tahun 2011. Perkebunan besar banyak di dominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian. Secara lengkap perubahan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel.

Pada tahun 2017 Kabupaten Pringsewu terdapat hutan seluas 14.533,976 Ha. Hutan berada di wilayah Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. Secara keseluruhan terdapat lahan seluas 3,567 Ha yang mengalami perubahan selama kurun waktu 5 tahun.

Analisis perubahan penggunaan lahan dalam laporan neraca penggunaan lahan kabupaten Pringsewu 2017 dihasilkan dari analisis GIS dengan menggunakan peta tanah lama menggunakan data RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031. Sedang pemetaan penggunaan Lahan Eksisting dilakukan menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan konsep klasifikasi terawasi dan tak terawasi menggunakan Citra Landsat-8 liputan tahun 2017.

Di Kecamatan Adiluwih mengalami perubahan penggunaan tanah berupa sawah menjadi pemukiman seluas 217 Ha. Begitu juga dengan tegalan yang beralih fungsi menjadi pemukiman seluas 1.335 Ha. Dari data tersebut bisa diketahui kecamatan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama yang berada disepanjang jalan utama.

Untuk pemukiman di Kecamatan Ambarawa, dilihat dari analisa GIS mengalami penambahan luas sebesar 459,38 Ha berasal dari alih fungsi lahan sawah dan tegalan. Daerah Ambarawa memiliki banyak lahan

pertanian kering yang beralih fungsi menjadi pemukiman karena letaknya yang dekat dengan ibu kota Pringsewu. Perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Pringsewu paling banyak memang didominasi dengan perkembangan pemukiman. Secara spesifik didominasi oleh pertumbuhan jasa dan perdagangan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Pringsewu.

Perubahan penggunaan lahan pertanian pangan seperti sawah memang berbanding terbalik dengan perkembangan pemukiman serta pertanian disektor non-pangan lainnya. Untuk mencetak lahan sawah tentu akan lebih sulit dibandingkan dengan mengurug sawah untuk dijadikan lahan terbangun. Untuk mengendalikan pembangunan yang memberi dampak kepada menyusutnya lahan sawah, maka pemerintah daerah tidak hanya harus tegas melaksanakan alih fungsi lahan sesuai dengan RTRW dan peraturan yang berlaku, akan tetapi pemilik tanah juga harus dipikirkan bagaimana kondisi ekonomi mereka. Kebanyakan motif masyarakat mengeringkan sawahnya kemudian dijadikan lahan terbangun karena masalah pendapatan. Hasil dari mengolah sawah tentu tidak sebanding jika tanah tersebut kemudian dibangun Ruko yang disewakan atau dijual kepada investor. Oleh karena itu, insentif dan *punishment* harus diatur oleh Pemerintah Daerah mengenai lahan pertanian berkelanjutan ini, sehingga carut marut pembangunan dapat dikendalikan dan memperkecil dampak bagi kerusakan alam.

Beralih fungsinya lahan hutan menjadi area tegalan dan kampung juga seharusnya menjadi perhatian. Jika dibiarkan tanpa ada perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah, tentu akan menimbulkan masalah baru di Kabupaten Pringsewu. Hendaknya hutan lindung memang difungsikan sebagaimana fungsinya, dan menertibkan masyarakat yang melakukan perambahan hutan khususnya hutan lindung.

6.2. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

6.2.1. Pola Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu, terdapat kawasan hutan lindung seluas 13.373,695 Ha. Dari data tersebut terdapat area seluas 36.411 Ha dapat difungsikan untuk budidaya non kehutanan yang diatur melalui perundang-undangan yang berlaku.

NO	FUNGSI	LUAS (Ha)	%
1	Hutan Lindung	13373.695	20.7
2	Pertanian Tanaman Pangan	10958.068	17.0
3	Sempadan Sungai	4417.087	6.8
4	Kawasan Perdagangan & Jasa	1382.017	2.1
5	Pertanian Tanaman Hortikultura	3659.294	5.7
6	Perkebunan	21793.636	33.7
7	Permukiman	9044.451	14.0
		64628.248	100

Tabel 6.3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Lahan Pada Pola Ruang RTRW 2011

Kabupaten Pringsewu mengalokasikan 34% wilayahnya untuk perkebunan besar atau seluas 21.794 Ha. Sebaran kawasan perkebunan sebagian besar berada di bagian utara pusat kota, dialokasikan di Kecamatan Pagelaraan Utara, Banyumas, Sukoharjo, dan Adiluwih Sementara di bagian Selatan Kabupaten Pringsewu di alokasikan di Kecamatan Pardasuka dan Gading Rejo. Kawasan pertanian pangan sebagian besar berada di bagian selatan Kabupaten Pringsewu meliputi Kecamatan Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran Gading Rejo, Sedangkan pertanian hortikultura banyak berada di kecamatan Gading Rejo, Pagelaran dan Banyumas. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031, dilakokasikan lahan seluas 14.617 Ha untuk kawasan pertanian lahan kering dan Holtikultura sedangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa dialokasikan seluas 1.382 Ha. Kawasan perdagangan dan jasa terpusat kecamatan Pringsewu dan Gading Rejo.

6.2.2. Kesesuaian Penggunaan Lahan

Pembangunan di semua Kabupaten/Kota di Indonesia tentu memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan social, ekonomi dan budaya. Pembangunan fisik yang mengakibatkan alih fungsi lahan, tentu mengakibatkan beberapa permasalahan seperti tidak sesuai dengan RTRW, tidak sesuai dengan kondisi budaya masyarakat, tidak sesuai dengan ekologi lingkungan sehingga bisa menimbulkan pencemaran.

Pada analisa kali ini, akan menyajikan beberapa poin penting mengenai perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Pringsewu, dimana perubahan penggunaan tanag tidak selamanya berlangsung sesuai dengan arahan tata ruang. Langkah untuk mengetahui Analisa Perubahan Penggunaan Tanah pada Fungsi Kawasan adalah dengan melakukan *overlay* (tumpang tindih) Peta Perubahan Penggunaan Tanah dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya melakukan inventarisasi luas, jenis, dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun waktu tertentu dalam fungsi kawasan pada RTRW.

Dari hasil analisa, di Kabupaten Pringsewu memiliki kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan fungsi kawasan sebesar 68,27%. Angka tersebut meliputi fungsi kawasan perkebunan sebesar 23,35%, kemudian pertanian tanaman pangan sebesar 15,54%, Hutan Lindung sebesar 10,37%, pemukiman 9,57%,

Pertanian Holtikultura 4,43%, Sempadan Sungai 3,56% dan terakhir Kawasan Perdagangan Dan Jasa sebesar 1,46%. Total dari luas keseluruhan penggunaan tanah yang sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan adalah 42.676,35 Ha. Kemudian untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan fungsinya seluas 19.834,89 Ha atau 31,73% dari luas Kabupaten Pringsewu. Dari beberapa arahan fungsi kawasan, perkebunan paling banyak menghasilkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan fungsinya, seluas 4,93%, Sempadan sungai 2,83%, kemudian berturut-turut Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Tanaman Holtikultura, serta yang terakhir Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Pada Kecamatan Adiluwih, terdapat perubahan penggunaan tanah dari tahun 2011 hingga tahun 2017 hanya 34% dari luas wilayah yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, atau sekitar 2.548 Ha. Sedangkan sisanya 66% telah sesuai dengan arahan fungsi kawasan, sebagaimana detail datanya dapat dilihat pada tabel. Kesesuaian terbesar adalah penggunaan tanah tegalan dengan fungsi kawasan perkebunan seluas 2.924,95 Ha, sedangkan ketidak sesuaian terbesar adalah penggunaan tanah pemukiman dengan fungsi kawasan perkebunan seluas 1.207,54 Ha.

Dari hasil analisa GIS, Kecamatan Ambarawa memiliki 72% dari luas wilayah kecamatan penggunaan tanah tahun 2017 yang sesuai dengan RTRW. Artinya seluas 2217,35 Ha penggunaan tanah sudah sesuai dengan fungsi kawasannya. Sedangkan seluas 881,91 Ha penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan RTRW, atau sekitar 28% dari luas wilayah kecamatan. Di kecamatan ini, sawah irigasi adalah penggunaan tanah yang paling sesuai dengan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan, sedangkan yang tidak sesuai adalah pemukiman yang seharusnya merupakan kawasan pertanian pangan.

Kecamatan Banyumas merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Pringsewu. Di daerah tersebut terdapat 2.999,73 Ha lahan yang penggunaannya sesuai dengan arahan fungsi kawasan pada RTRW, atau sekitar 75% dari wilayah kecamatan. Sedangkan untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW sebesar 25% atau 985 Ha. Kebun campuran mendominasi penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW, sedangkan hutan belukar merupakan penyumbang penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW.

Untuk Kecamatan Gadingrejo, terdapat 30% dari luas kecamatan yang tidak sesuai penggunaan tanahnya dengan RTRW atau seluas 5.976,53 Ha. Kemudian untuk penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW seluas 2.594,54 Ha atau 70% dari luas kecamatan. Dari penggunaan tanah yang sesuai tersebut sawah irigasi yang paling sesuai dengan RTRW.

Tingkat kesesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Pagelaran adalah 35% tidak sesuai dengan RTRW dan 65% sesuai dengan RTRW atau seluas 11.249,79 Ha sesuai dengan RTRW dan 6.025,20 Ha tidak sesuai dengan RTRW. Penggunaan tanah yang tidak sesuai kebanyakan adalah pemukiman yang dibangun dikawasan pertanian maupun pemukiman yang dibangun di sempadan sungai.

KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN PRINGSEWU DENGAN EXISTING 2015

NO	JENIS TUTUPAN LAHAN	PERUBAHAN							Data Awal
		Hutan Lahan Kering Sekunder	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Basah	Savana	Sawah	Tubuh Air	
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.727,235	5.061,628	4.640,871	-	55,973	2.122,754	58,713	13.667,17
2	Hutan Mangrove Sekunder	18,529	1,535	4,890			8,516		33,47
3	Hutan Rawa Sekunder	82,762	28,805	25,863		2,338	9,178	507,834	656,78
4	Hutan Tanaman Industri	59,202	15,661	74,296		0,657	23,169		172,99
5	Perkebunan	82,401	16.208,776	56,897			4,884		16.352,96
6	Permukiman	4.359,369	639,643	6.123,388		23,659	765,404		11.911,46
9	Savana	-					4,702		4,70
10	Sawah	5.773,274	715,057	1.773,623		123,738	7.437,719		15.823,41
11	Semak Belukar	1.822,687	1.643,540	249,202	1,557	16,110	334,162	335,359	4.402,62
12	Sungai	11,877		9,441			3,931		25,25
13	Tambang	541,027	403,598	206,263		3,889	136,694	127,057	1.418,53
14	Tanah Terbuka	55,613	6,467	13,741			28,614		104,44
15	Tubuh Air	-					-	54,531	54,53
	Existing	14.533,976	24.724,710	13.178,475	1,557	226,364	10.879,727	1.083,494	
	Tutupan Lahan Yang Sesuai								

KESESUAIAN POLA RUANG FUNGSI LINDUNG DENGAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	POLA RUANG	PENGGUNAAN LAHAN	KESESUAIAN	PERUBAHAN	LUAS (HA)	%
1	KAW. HUTA	Hutan Lahan Kering Sekunder	Sesuai	KAW. HUTAN LINDUNG-->Hutan Lahan Kering Sekunder	1612,936	12,092
		Perkebunan	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Perkebunan	9469,34	70,990
		Permukiman	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Permukiman	1680,068	12,595
		Pertanian Lahan Basah	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Pertanian Lahan Basah	1,557	0,012
		Pertanian Lahan Kering	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Pertanian Lahan Kering	198,646	1,489
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Pertanian Lahan Kering Campur Semak	310,186	2,325
		Savanna	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Savanna	1,572	0,012
		Tubuh Air	Tidak	KAW. HUTAN LINDUNG-->Tubuh Air	64,743	0,485
				13339,048	100	
2	KL BAGI DA	Hutan Lahan Kering Sekunder	Sesuai	KL BAGI DAERAH SETEMPAT-->Hutan Lahan Kering Sekunder	88,802	3,217
		Perkebunan	Sesuai	KL BAGI DAERAH SETEMPAT-->Perkebunan	488,509	17,699
		Permukiman	Tidak	KL BAGI DAERAH SETEMPAT-->Permukiman	499,579	18,100
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Sesuai	KL BAGI DAERAH SETEMPAT-->Pertanian Lahan Kering Campur Sema	688,839	24,957
		Tubuh Air	Tidak	KL BAGI DAERAH SETEMPAT-->Tubuh Air	994,357	36,026
				2760,086	100,000	

KESESUAIAN POLA RUANG FUNGSI BUDUDAYA DENGAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	POLA RUANG	PENGGUNAN LAHAN	KESESUAIAN	PERUBAHAN	LUAS (HA)	%
1	HUTAN PRODUKSI	Perkebunan	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Perkebunan	26,006	4,548
		Permukiman	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Permukiman	123,264	21,557
		Pertanian Lahan Kering	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Pertanian Lahan Kering	49,917	8,730
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Pertanian Lahan Kering Campur Semak	363,760	63,617
		Savanna	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Savanna	0,504	0,088
		Sawah	Tidak	HUTAN PRODUKSI-->Sawah	8,347	1,460
						571,798
2	PERKEBUNAN	Pertanian Lahan Kering Sekunde	Tidak	PERKEBUNAN-->Hutan Lahan Kering Sekunde	580,342	2,414
		Perkebunan	Sesuai	PERKEBUNAN-->Perkebunan	8.599,010	35,774
		Permukiman	Tidak	PERKEBUNAN-->Permukiman	3.252,069	13,530
		Pertanian Lahan Kering	Tidak	PERKEBUNAN-->Pertanian Lahan Kering	3.005,430	12,503
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Tidak	PERKEBUNAN-->Pertanian Lahan Kering Campur Semak	8.267,113	34,394
		Savanna	Tidak	PERKEBUNAN-->Savanna	107,216	0,446
		Sawah	Tidak	PERKEBUNAN-->Sawah	225,012	0,936
		Tubuh Air	Tidak	PERKEBUNAN-->Tubuh Air	0,619	0,003
				24.036,811	100,000	
3	PERMUKIMAN	Pertanian Lahan Kering Sekunde	Tidak	PERMUKIMAN-->Hutan Lahan Kering Sekunde	78,308	0,525
		Perkebunan	Tidak	PERMUKIMAN-->Perkebunan	1.877,669	12,580
		Permukiman	Sesuai	PERMUKIMAN-->Permukiman	521,015	3,491
		Pertanian Lahan Kering	Tidak	PERMUKIMAN-->Pertanian Lahan Kering	3.391,360	22,721
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Tidak	PERMUKIMAN-->Pertanian Lahan Kering Campur Semak	8.870,942	59,433
		Savanna	Tidak	PERMUKIMAN-->Savanna	72,748	0,487
		Sawah	Tidak	PERMUKIMAN-->Sawah	113,803	0,762
				14.925,845	100,000	
4	PERTANIAN	Pertanian Lahan Kering Sekunde	Tidak	PERTANIAN-->Hutan Lahan Kering Sekunder	1,984	0,049
		Perkebunan	Tidak	PERTANIAN-->Perkebunan	26,417	0,650
		Permukiman	Tidak	PERTANIAN-->Permukiman	406,489	10,010
		Pertanian Lahan Kering	Sesuai	PERTANIAN-->Pertanian Lahan Kering	1.887,224	46,472
		Pertanian Lahan Kering Campur Semak	Sesuai	PERTANIAN-->Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1.670,743	41,142
		Savanna	Tidak	PERTANIAN-->Savanna	44,329	1,092
		Tubuh Air	Tidak	PERTANIAN-->Tubuh Air	23,775	0,585
						4.060,961

Kecamatan Pardasuka memiliki 26% luas wilayah dimana penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Selebihnya, 74% dari luas kecamatan merupakan daerah yang sesuai dengan RTRW. Dengan demikian, terdapat 6.981,13 Ha daerah yang sesuai dengan RTRW dan 2.493,28 Ha byang tidak sesuai dengan RTRW. Penggunaan tanah sawah merupakan penggunaan yang paling sesuai dengan RTRW di kecamatan ini, sedangkan yang paling tidak sesuai adalah pemukiman yang seharusnya dijadikan kawasan perkebunan serta sempadan sungai.

Kecamatan Pringsewu merupakan pusat ibukota kabupaten, sehingga pada daerah ini banyak mengalami pembangunan fisik dan alih fungsi lahan. Berdasarkan analisa GIS, kecamatan ini memiliki penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW sebesar 41% dengan penggunaan tanah yang banyak tidak sesuai adalah permukiman. Sementara untuk tanah yang sesuai penggunaannya dengan RTRW adalah 59% dari luas kecamatan.

Kecamatan Sukoharjo memiliki 71% lahan yang penggunaan tanahnya sesuai dengan RTRW. Artinya, seluas 2.109,82 Ha atau 29% dari luas kecamatan, tanah yang ada di Sukoharjo belum diperuntukkan sesuai dengan fungsi kawasannya. Penggunaan tanah berupa kebun campuran sangat mendominasi di kecamatan ini, sehingga dari sektor inilah penggunaan tanah yang paling sesuai dengan RTRW. Sedangkan untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW adalah pemukiman yang seharusnya lahan tersebut diarahkan untuk perkebunan dan pertanian tanaman holtikultura.

NO	KECAMATAN	KESESUAIAN	LUAS	%
1	ADILUWIH	Sesuai	343.034	71.926
		Tidak Sesuai	133.889	28.074
2	AMBARAWA	Sesuai		
		Tidak Sesuai		
3	BANYUMAS	Sesuai	0.000	0.000
		Tidak Sesuai	47.043	100.000
4	GADINGREJO	Sesuai	0.000	
		Tidak Sesuai	72.496	100.000
5	PAGELARAN	Sesuai		
		Tidak Sesuai		
6	PAGELARAN UTARA	Sesuai	1531.149	13.729
		Tidak Sesuai	9621.339	86.271
7	PARDASUKA	Sesuai	503.810	14.442
		Tidak Sesuai	2984.596	85.558
8	PRINGSEWU	Sesuai	135.930	42.086
		Tidak Sesuai	187.054	57.914
9	SUKOHARJO	Sesuai	365.163	67.774
		Tidak Sesuai	173.633	32.226

Tabel 6.7 Kesesuaian Penggunaan Lahan Fungsi Lindung Terhadap RTRW Perkecamatan

NO	KECAMATAN	KESESUAIAN	LUAS	%
1	ADILUWH	Sesuai	1490.277	22.044
		Tidak Sesuai	5270.052	77.956
2	AMBARAWA	Sesuai	1784.227	47.685
		Tidak Sesuai	1957.451	52.315
3	BANYUMAS	Sesuai	2231.860	46.828
		Tidak Sesuai	2534.248	53.172
4	GADINGREJO	Sesuai	1632.421	24.165
		Tidak Sesuai	5123.013	75.835
5	PAGELARAN	Sesuai	860.614	19.752
		Tidak Sesuai	3496.484	80.248
6	PAGELARAN UTARA	Sesuai	2636.474	48.883
		Tidak Sesuai	2757.018	51.117
7	PARDASUKA	Sesuai	3876.968	47.645
		Tidak Sesuai	4260.153	52.355
8	PRINGSEWU	Sesuai	1674.221	40.551
		Tidak Sesuai	2454.475	59.449
9	SUKOHARJO	Sesuai	1186.934	26.441
		Tidak Sesuai	3302.094	73.559

Tabel 6.8Kesesuaian Penggunaan Lahan Fungsi Budi Daya Terhadap RTRW Perkecamatan

6.3. Analisa Ketersediaan Tanah

Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah dalam Tata Ruang menunjukkan tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang, dengan mempertimbangkan aspek penguasaan dan penggunaan tanah. Ketersediaan Tanah Per Kecamatan disajikan pada **tabel 6.15**

NO	JENIS KETERSEDIAAN	LUAS (HA)
1	Ketersediaan Bersyarat Kawasan Budidaya	4511.749
2	Ketersediaan Dalam Rangka Optimalisasi	15842.916
3	Ketersediaan Dalam Rangka Penyesesuaian	34773.02
4	Ketersediaan Bersyarat Kawasan Lindung	11435.152

Tabel 6.9 Ketersediaan Tanah Kabupaten Pringsewu

Di Kabupaten Pringsewu terdapat 4 jenis ketersediaan tanah. Empat jenis ketersediaan tanah tersebut adalah:

1. *Tersedia dalam rangka optimalisasi*, artinya pada lokasi tersebut merupakan daerah dengan penggunaan tanah yang sudah sesuai dengan RTRW, sehingga penggunaannya bisa lebih dioptimalkan lagi.

2. *Tersedia dalam rangka penyesuaian*, yakni pada daerah dengan penggunaan tanah yang belum sesuai dengan RTRW, diharapkan untuk pembangunan kedepannya daerah ini di sesuaikan dengan fungsinya.
3. *Ketersediaan bersyarat untuk kawasan lindung*, merupakan daerah dimana penggunaan tanahnya berada pada lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti sempadan sungai dan hutan lindung.
4. *Tersedia untuk kegiatan budidaya*, merupakan daerah yang penggunaan tanahnya belum banyak dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Dengan keempat kriteria tersebut, diharapkan bisa memberi informasi dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pembangunan daerah.

Untuk Kecamatan Adiluwih, terdapat kurang lebih 4933Ha yang bisa dioptimalkan penggunaannya, sedangkan seluas 2548Ha harus disesuaikan dengan RTRW. Pada kecamatan ini masih banyak tanah yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan, terutama dari sektor perkebunan seperti kebun coklat maupun kopi.

Kecamatan Ambarawa terdapat 2215Ha tanah yang dapat dioptimalkan penggunaannya. Tanah yang harus dioptimalkan pada daerah ini adalah sektor pertanian untuk tanaman pangan, terutama sawah. Selanjutnya harus ada alih fungsi lahan subur menjadi daerah terbangun ditekan sehingga bisa menjaga ketersediaan tanaman pangan.

Di Kecamatan Banyumas, hampir 3000Ha lahan disini dapat dioptimalkan penggunaannya, selanjutnya daerah yang harus menjadi perhatian adalah lahan seluas 739Ha supaya disesuaikan penggunaannya. kecamatan ini hampir sama dengan kecamatan Adiluwih, yakni lebih banyak diarahkan penggunaan tanahnya di sektor perkebunan. Kemudian terdapat juga lahan seluas 245Ha untuk di kembangkan sesuai dengan arahan RTRW, serta sekitar setengah hektar agar tetap di pertahankan sebagai kawasan lindung dengan memanfaatkan tanah sebagai sempadan sungai.

Di Gadingrejo sendiri terdapat 2594Ha lahan yang harus disesuaikan lagi penggunaannya sesuai dengan RTRW, karena hanya sekitar 5976Ha yang sudah sesuai dan bisa dioptimalkan penggunaan tanahnya.

Di kecamatan Pagelaran, tanah yang harus disesuaikan penggunaannya dengan RTRW sudah mencapai 5852,18Ha. Tanah seluas 4765Ha di Pagelaran juga harus tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung, baik berupa hutan maupun sempadan sungai.

Di kecamatan Pagelaran Utara, hampir 3000Ha lahan disini dapat dioptimalkan penggunaannya, selanjutnya daerah yang harus menjadi perhatian adalah lahan seluas 739Ha supaya disesuaikan penggunaannya.

Di Kecamatan Pardasuka terdapat tanah seluas 4964Ha yang bisa dioptimalkan penggunaannya. Kemudian seluas 956Ha perlu disesuaikan dengan RTRW, serta seluas 2017 ha harus tetap diarahkan sebagai kawasan lindung. Dan terakhir di kecamatan ini juga terdapat tanah seluas 1536Ha yang bisa digunakan untuk

kegiatan budidaya. Daerah Pardasuka sesuai dengan arahan fungsi lahan, bisa lebih dioptimalkan penggunaan tanahnya untuk perkebunan dan pertanian sektor pangan.

Tanah seluas 3132Ha di Kecamatan Pringsewu tersedia untuk dioptimalkan penggunaannya terutama untuk sektor permukiman, jasa dan perdagangan. Untuk kawasan lindung, terdapat seluas 0,29Ha yang harus dipertahankan sesuai dengan fungsinya. Kemudian seluas 2051Ha tanah di kecamatan ini harus disesuaikan lagi penggunaannya dengan RTRW jika ingin melakukan pembangunan di lokasi yang sudah tidak sesuai penggunaannya dengan RTRW.

Terakhir di Kecamatan Sukoharjo, pembangunan di daerah ini dapat menggunakan tanah yang telah sesuai dengan RTRW sehingga hanya cukup mengoptimalkan penggunaannya seluas 5185Ha. Selebihnya seluas 2109Ha harus dilakukan penyesuaian penggunaan tanahnya terhadap RTRW. Pembangunan di Kecamatan ini banyak diarahkan untuk perkebunan, sehingga jika ada investor yang ingin mengembangkan perkebunan di Kecamatan ini bisa diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan fungsi kewasannya.

NO	KECAMATAN	KESESUAIAN	LUAS	%
1	ADILUWIH	Sesuai	343,034	71,926
		Tidak Sesuai	133,889	28,074
2	AMBARAWA	Sesuai	0,000	0,000
		Tidak Sesuai	0,000	0,000
3	BANYUMAS	Sesuai	0,000	0,000
		Tidak Sesuai	47,043	100,000
4	GADINGREJO	Sesuai	0,000	
		Tidak Sesuai	72,496	100,000
5	PAGELARAN	Sesuai	0,000	0,000
		Tidak Sesuai	0,000	0,000
6	PAGELARAN UTARA	Sesuai	1531,149	13,729
		Tidak Sesuai	9621,339	86,271
7	PARDASUKA	Sesuai	503,810	14,442
		Tidak Sesuai	2984,596	85,558
8	PRINGSEWU	Sesuai	135,930	42,086
		Tidak Sesuai	187,054	57,914
9	SUKOHARJO	Sesuai	365,163	67,774
		Tidak Sesuai	173,633	32,226

Tabel 6.10 Ketersediaan Tanah Kabupaten Pringsewu

6.4. Analisa pengembangan kawasan strategis berdasarkan komoditas tertentu

Sebagai daerah yang masih agraris, struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh sektor Pertanian dengan komoditas yang dominan adalah Padi sawah dan ladang, padi organik, jagung, dan juga Komoditas sayur mayur serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau.

Total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten Pringsewu adalah 193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar ±800ton/tahun, sentra padi organik terdapat di Kecamatan Pagelaran utara dan Kecamatan

Gadingrejo, yang sebagian besar dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual yang lebih tinggi sekitar 30%-40% dibanding padi pada umumnya, potensi ini dapat dikembangkan dengan adanya lahan yang tersedia dan SDM petani SLPH yang ada, serta terbukanya peluang pengembangan industri penggilingan beras.

Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya. Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung, seperti Jakarta dan Palembang.

Dibidang perikanan, Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan usaha budidaya Air Tawar. Pada tahun 2011 potensi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Pringsewu sebesar ± 1.000 Ha dengan tingkat pemanfaatan lahan seluas ± 500 Ha dan produksi secara keseluruhan sebesar ± 4.650 ton.

Salah satu komoditas penting perikanan budidaya di Kabupaten Pringsewu adalah ikan gurame, disamping komoditas lain seperti ikan lele, mas, nila, belut, dan patin. Pada tahun 2011 pemanfaatan kolam untuk komoditas ikan gurame adalah seluas 92,5 Ha dengan produksi kurang lebih sebesar 300 ton. Pemanfaatan kolam gurame tersebut menyebar di 5 (empat) Kecamatan yakni, Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, Pardasuka, Banyumas, dan Sukoharjo.

Pengembangan komoditas ikan gurame di Pringsewu sangat menjanjikan hal ini disebabkan oleh selain kondisi daerah yang sangat mendukung juga disebabkan kegiatan budidaya ikan gurame memiliki nilai ekonomis yang tinggi disemua tahapan produksi.

Potensi bidang peternakan di Kabupaten Pringsewu juga sangat potensial untuk dikembangkan, baik potensi pengembangan ternak kecil maupun besar. Untuk ternak kecil, potensi Kambing dan Domba sangat potensial, hal ini dapat dilihat dari potensi kambing yang ada sebesar ± 55.000 ekor dan populasi domba sebesar ± 14.000 ekor dan juga ternak babi sebesar ± 300 ekor. Dengan pemanfaatan luas lahan serta padang rumput yang ada, usaha pengembangan kambing burawa sangat sangat cocok sekali dikembangkan di Kabupaten Pringsewu. Kambing jenis ini merupakan hasil persilangan antara induk betina peranakan kambing ettawa (PE) yang memiliki tuuh besar dan Kambing jantan Boer sebagai kambing pedaging. Untuk potensi ternak besar, Kabupaten Pringsewu juga sangat potensial, hal ini dapat dilihat dari populasi ternak besar yang ada seperti sapi sebanyak ± 9.500 ekor dan populasi kerbau sebanyak ± 3.300 ekor.

Pengembangan usaha peternakan sapi potong, merupakan salah satu usaha yang cukup prospektif di Kabupaten Pringsewu, peluang pengembangan sapi potong juga didukung oleh harga sapi hidup dan daging sapi yang terus meningkat, tersedianya teknologi pakan ternak dan produksi IB maupun embrio transfer, serta meningkatkan permintaan daging sapi segar dan olahan di dalam negeri. Usaha ini juga di dukung oleh ketersediaan lahan yang luas bagi budidaya tanaman rumput gajah sebagai bahan pakan ternak. Dengan

masih banyaknya areal pekarangan serta lahan yang ada, di Kabupaten Pringsewu juga memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan unggas.

Jenis unggas yang dapat di kembangkan adalah ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan ternak itik. Populasi rata-rata unggas pertahun di Kabupaten Pringsewu adalah ayam buras ± 108.500 ekor, ayam ras petelur ± 133.100 ekor, ayam ras pedaging $\pm 1.741.200$ ekor, dan populasi itik sebanyak ± 25.150 ekor.

Di bidang pertambangan, Kabupaten Pringsewu mempunyai sumber daya alam bahan tambang yang cukup potensial. Terdapat beberapa jenis bahan galian seperti mangan, bentonit, marmer, biji besi, silika, biorit dan andesit yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk potensi sumber air mineral di Kecamatan Ambarawa yakni air Karawang yang sudah terkenal di seluruh Provinsi Lampung. Sebagian besar potensi tersebut masih belum dioptimalkan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Pringsewu membuka seluas-luasnya kepada para investor yang ingin berinvestasi di bidang pertambangan dengan mempermudah proses perizinannya.

Dalam bidang industri, Kabupaten Pringsewu masih di dominasi oleh industri kecil dan home industri, diantaranya industri kain tapis, manik-manik, kain perca, dan kerajinan anyaman bambu, industri batu bata dan genteng. Industri kain perca Pringsewu yang berpusat di kawasan Banyumas telah mampu menembus pasar di seluruh Sumatera dan Jawa. Selain itu, kerajinan yang berbahan baku dari batu Sui Seki, merupakan kerajinan yang cukup unik dan sangat menarik dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kerajinan Sui Seki ini sebagian besar masih industri perorangan dan industri rumah tangga. Untuk industri batu bata, di Pringsewu terdapat sebanyak ± 250 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak ± 3.200 orang, dengan kapasitas produksi mencapai $\pm 90.000.000$ buah per tahun dan nilai investasi sebesar 26 miliar lebih. Begitu pula dengan industri pembuatan genteng, Kabupaten Pringsewu memiliki total industri sebanyak 137 unit, dengan kapasitas produksi $\pm 50.000.000$ per tahun, dengan nilai investasi sebesar 15 milyar lebih dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.100 orang, meskipun sebagian besar masih bersekala kecil dan menengah.

Dalam bidang pariwisata, bidang ini masih memerlukan dukungan dan upaya yang lebih optimal, sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Pringsewu dapat berkembang secara optimal. Sebagai modal awal dan sumber daya alam, di Pringsewu terdapat beberapa obyek wisata yang prospektif untuk dikembangkan diantaranya tempat ziarah berupa makam KH Ghalib dan wisata religi umat khatolik Goa Maria La Verna, bangunan bersejarah peninggalan Belanda berupa Talang, kawasan bukit bintang yang kesemuanya berlokasi di sekitar ibukota Kabupaten Pringsewu.

Selain itu terdapat potensi wisata lainnya seperti Goa selapan di kecamatan Pardasuka, Telaga Gumpit dan Bangunan Pura Bukit Hindu yang berada di Kecamatan Gadingrejo, serta masih banyak lokasi-lokasi menarik yang memiliki prospek untuk di kembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata, yang belum tergali secara maksimal.

Selain itu, sejumlah wisata lain yang sebagian sudah di kelola oleh masyarakat diantaranya berupa kolam renang. Bagi pecinta kuliner, kehidupan malam di Pringsewu juga menjanjikan suguhan wisata kuliner yang tak kalah menarik sepanjang malam. Berbagai macam suguhan dan menu khas masakan modern hingga tradisional tersedia cukup lengkap di berbagai sudut lokasi. Termasuk tersedia pula berbagai restoran besar dan kecil yang menyajikan mulai masakan tradisional, nasional hingga restoran cepat saji. Tak ketinggalan pula sarana pendukung lainnya yakni jasa akomodasi berupa fasilitas hotel dan penginapan, telah tersedia pula di Pringsewu. Untuk menampung beberapa komoditas yang tersebar di beberapa Kecamatan, maka disusunlah pengembangan kawasan di Kabupaten Pringsewu, berdasarkan kelebihan masing-masing daerah.

A. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pada dasarnya konsep pengembangan kawasan agropolitan merupakan pengembangan sistem desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten). Ciri-ciri kawasan agropolitan adalah berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Kawasan agropolitan merupakan rencana kawasan yang akan di kembangkan di Kabupaten Pringsewu, lokasi tersebut direncanakan akan di kembangkan di Kecamatan Gadingrejo, yang lokasi detailnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Perencanaan Kawasan Agropolitan ini dalam rangka:

- Pembangunan wilayah pedesaan untuk mengatasi kesenjangan kawasan perkotaan dan pedesaan dan kemiskinan di pedesaan
- Pendekatan yang dilaksanakan mengakibatkan urban bias
- Urbanisasi yang cenderung meningkat dan tidak terkendali semakin mendesak produktivitas pertanian
- Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan pedesaan melalui urban-rural linkages untuk mencegah urban bias

B. Pengembangan Kawasan Perkebunan

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang memiliki potensi perkebunan di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini dapat terlihat dari adanya luasan areal perkebunan yang cukup besar di wilayah ini. Beberapa komoditi perkebunan yang cukup berpotensi di wilayah ini antara lain: Kopi, Kelapa, Lada dan Kakao.

Pada tahun 2011 komoditi tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekspor paling besar adalah sebagai berikut:

1. Kopi terdapat di Kecamatan Pardasuka
2. Lada terdapat di Kecamatan Pardasuka

3. Kelapa hybrida terdapat di Kecamatan Gadingrejo
4. Kakao terdapat di Kecamatan Pardasuka
5. Kayu manis terdapat di Kecamatan Pardasuka
6. Kapuk terdapat di Kecamatan Pardasuka

Selain itu, berdasarkan hasil analisis diketahui pula terdapat beberapa komoditi yang menjadi sektor basis dalam lingkup kecamatan dan bahkan ada yang berpotensi nilai ekspor. Sehingga selain berpotensi menjadiproduk andalan wilayah kecamatan dan wilayah kabupaten, juga berpotensi menjadi bahan baku kegiatan agroindustri di wilayah ini maupun di wilayah sekitarnya. Komoditi yang menjadi unggulan kebun tanaman keras adalah kelapa hybrida, kakao dan kayu manis.

C. Kawasan Perdagangan Regional

Pemekaran wilayah kabupaten pringsewu memberikan dampak pertumbuhan yang pesat terhadap wilayah-wilayah didalamnya. Kecamatan Pringsewu merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu, sebagai pusat kegiatan yang berada pada jalur lintas barat sumatera yang strategis, telah menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah yang sangat ramai. Sehingga, lahan di wilayah ini telah menjadi primadona bagi parapelaku bisnis dan usaha lainnya. Kondisi tersebut cenderung akan memicu terjadinya alih fungsi lahan dari permukiman ke non permukiman yang lebih pesat dari daerah lainnya.

D. Kawasan Permukiman Berkepadatan Tinggi

Sebagai wilayah yang berdekatan dengan pusat ibukota Kabupaten Pringsewu baik dari faktor jarak tempuh maupun waktu tempuh Kecamatan Ambarawa tentu akan terpengaruh faktor migrasi ke wilayah ini. Kemudian tingkat pencapaian ke ibukota Provinsi, menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan pilihan bermukim di wilayah ini. Dengan demikian kecamatan ini menjadi salah satu kawasan strategis. Maka di perlukan usaha-usaha sebagai berikut:

- Pembangunan yang dilakukan disesuaikan dengan daya dukung lahan
- Kepadatan penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota
- Penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan perkembangan penduduk

E. Kawasan Pusat Pengembangan Pendidikan

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu wilayah yang memberikan perhatian cukup besar terhadap dunia pendidikan. Hal ini terlihat pada tersedianya institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Komitmen tersebut diimplementasikan kedalam visi pembangunan daerah yang menyatakan bahwa upaya membangun masyarakat sejahtera ditempuh melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga menjadi hal yang lumrah bahwa saat ini telah hadir beberapa lembaga/institusi pendidikan tingkat tinggi di Kabupaten Pringsewu baik yang dikelola oleh swasta maupun negeri, dimana para siswa/mahasiswa-nya bukan

saja datang dari wilayah kabupaten pringsewu, namun juga datang dari luar wilayah Kabupaten Pringsewu (Lampung dan sekitarnya).

Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi kabupaten pringsewu untuk menjadikannya sebagai “Kota Pendidikan”. Dan realisasi dari keinginan tersebut akan berdampak terhadap dinamika tata ruang wilayah kedepannya, yang tentu membutuhkan perencanaan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan yang terjadi.

Sebagai salah satu antisipasi dari perkembangan kebutuhan prasarana pendidikan berikut infrastruktur pendukungnya maka dirasakan pula untuk memberikan ruang yang secara khusus dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat pendidikan. Terlebih dengan akan dikembangkannya wilayah kabupaten pringsewu sebagai kawasan agropolitan, tentunya memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mampu mengembangkan kawasan ini kedepannya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan yang direncanakan masih memiliki ketersediaan lahan relatif luas.
2. Kawasan tersebut tidak memiliki kendala pengembangan secara fisik, berada pada kondisi wilayah dengan topografi yang mendukung bagi peletakan bangunan.
3. Tidak berdekatan dengan pusat keramaian/pusat kota atau kegiatan perekonomian perkotaan.
4. Memiliki kedekatan dengan lahan atau lokasi yang dapat menjadi laboratorium pertanian sebagai tempat praktek.
5. Memiliki kemudahan pencapaian

Berdasarkan analisis dan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka kawasan pengembangan pusat pendidikan akan diarahkan di kecamatan Gadingrejo. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebaran Kawasan Strategis di Kabupaten.

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	LUAS (HA)	
		OPTIMALISASI	PENYESUAIAN
1	Kawasan Agropolitan	124,202	848,281
2	Kawasan Pemukiman Padat Penduduk	802,512	1.208,154
3	Kawasan Pengembangan Pendidikan	287,423	185,202
4	Kawasan Perdagangan Regional	912,348	1.231,863
5	Kawasan Minapolitan Budidaya	-	1.709,962

Tabel 6.11 Ketersediaan Lahan Kawasan Strategis

Untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, amanat RTRW 2011 sudah disediakan tanah yang ada di kabupaten Pringsewu Sebanyak 472,625Ha untuk pengembangan kawasan pendidikan. Dengan pengembangan kawasan strategis, diharapkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan bisa disesuaikan dengan fungsinya.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa neraca tahun 2017, penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang. Seluas 89% dari luas kabupaten penggunaan tanahnya telah sesuai dengan RTRW, sedangkan sisanya sebanyak 11% tidak sesuai dengan RTRW. Secara spasial, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW hampir merata di seluruh kecamatan.
2. Pada tahun 2017, Kabupaten Pringsewu memiliki penggunaan lahan paling dominan adalah kebun campuran, yakni sekitar 24.724,71Ha atau 38% dari luas wilayah kabupaten. Kebun Campuran paling banyak terdapat di Kecamatan Sukoharjo, Pagelaran, Pagelaran Utara dan Gadingrejo. Kebun campuran tersebut seperti kakao di Sukoharjo dan Pardasuka, kelapa hybrida di Gadingrejo, serta lada dan beberapa tanaman lainnya. Untuk sawah, di kabupaten ini banyak terdapat di beberapa kecamatan seperti Gadingrejo, sukoharjo, ambarawa, dan pringsewu. Lahan sawah di kabupaten pringsewu memiliki luas sekitar 10.882,841 Ha yang terdiri atas sawah irigasi dan non irigasi. Perkembangan pemukiman terutama untuk sektor jasa dan perdagangan sangat pesat di daerah ini. Invasi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian sangat banyak terlihat terutama di sepanjang jalan utama (Lintas Barat). Permukiman di Kabupaten Pringsewu tahun 2017 mencapai 13.178,475Ha, dengan dengan kepadatan tertinggi terletak diibukota Kabupaten. Pemukiman paling sedikit terletak di kecamatan Pardasuka, dengan luas sekitar 440Ha.
3. Penguasaan lahan di kabupaten pringsewu belum didominasi oleh penguasaan skala besar. Di daerah ini hanya terdapat hutan lindung yang berada di Kecamatan Pagelaran Utara dan Pardasuka seluas 13.373,695Ha selebihnys merupakan kawasan budidaya yang dapat di kembangkan penggunaannya sesuai dengan arahan tata ruang..
4. Berdasarkan pola ruang RTRW tahun 2011-2031, setiap jengkal tanah di Kabupaten Pringsewu dibagi dalam 7 fungsi ruang. Untuk fungsi kawasan lindung seperti hutan lindung dan sempadan sungai terdapat 17.790,782Ha, dimana lokasi hutan lindung terletak di Kecamatan Pardasuka dan Pagelaran Utara. Selanjutnya pola ruang peruntukan tanaman pangan seluas 10.958,068Ha terdapat diseluruh kecamatan yang bertujuan untuk mempertahankan lahan pangan seperti sawah. Pola ruang selanjutnya adalah perkebunan dan pertanian holtikultura seluas 21.793,636Ha dan 3.659,294Ha, terdapat merata di seluruh kecamatan. Untuk pengembangan, khususnya diwilayah Gadingrejo telah

ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Untuk pola ruang terakhir adalah kawasan permukiman dan kawasan jasa dan perdagangan seluas 9.044,451Ha dan 1.382,017Ha. Pengembangan jasa dan perdagangan banyak diarahkan di Kecamatan Pringsewu, sementara sentra pendidikan akan di kembangkan di daerah Gadingrejo.

5. Perubahan penggunaan lahan yang mengalami penurunan adalah tegalan dan hutan lindung. Hal ini sangat disayangkan jika kawasan hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian apalagi perkampungan. Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami kenaikan adalah permukiman yang semakin berkembang dari 11.911,463Ha menjadi 13.178,475Ha. Penggunaan lahan berupa sawah seperti juga mengalami penurunan dari 15826,.525Ha menjadi 10.882,841Ha.
6. Ketersediaan tanah di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan analisa neraca tahun 2017 adalah tersedia bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung seluas 11.435,152Ha, tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah seluas 15.842,916Ha, tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah seluas 34.773,02Ha, dan tersedia untuk kegiatan budidaya Sesuai tata ruang seluas 4.511,749Ha.
5. Kabupaten Pringsewu memiliki 83% kawasan diluar budidaya diluar kawasan hutan yang bisa dibangun dan dikembangkan menurut rencana tata ruang. Sebenarnya kawasan hutan lindung juga bisa di kembangkan untuk pembangunan, akan tetapi terdapat persyaratan ketat yang harus diikuti, terutama kajian Amdal untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Berdasarkan analisa neraca penatagunaan lahan terdapat empat macam ketersediaan lahan di Kabupaten Pringsewu. Pertama, Tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai tata ruang 2131,36Ha, kedua Tersedia Bersyarat untuk kegiatan berfungsi lindung seluas 6784,47Ha, ketiga Tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan lahan 17703,53Ha, dan terakhir Tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan seluas 35891,88Ha.

7.1. REKOMENDASI

Dengan luas sekitar 64.631,420Ha, Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan Lahan yang cukup banyak dengan sekitar 56.34% merupakan kawasan budidaya. Dengan laporan neraca lahan ini, maka beberapa poin rekomendasi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sebaiknya mengacu pada penggunaan tanah saat ini (eksisting), apabila ingin merubah penggunaan tanah agar sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang sebaiknya dibuat aturan/kebijakan yang baik dan tepat. Misalnya masyarakat harus dapat Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan
2. Berdasarkan UUD Pasal 33 ayat (3), segala kekayaan alam di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan tanah harus sesuai dengan pola pemanfaatan ruang serta penguasaan tanah harus dapat memberikan tanah bagi petani yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa
3. Lahan sawah yang sudah teridentifikasi seluas sebanyak 10.882,841Ha agar dapat dilaksanakan pengukuran/pemetaan dengan skala yang lebih detil, sehingga dalam penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa memperhatikan hak-hak masyarakat
4. Ketersediaan lahan untuk optimalisasi lebih ditingkatkan lagi produksi lahannya, seperti intensifikasi pertanian tanaman pangan. Pengembangan permukiman diarahkan ke lahan kering dan sebisa mungkin dikendalikan alih fungsi lahan sawah.
5. Pengembangan kawasan strategis di kawasan pringsewu diarahkan tidak mengurangi lahan sawah dan sempadan sungai, serta kawasan hutan lindung segera dikembalikan penggunaannya sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bintaro, R. *"Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya"*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1984
2. Bintang Hamonangan. *"Analisis Neraca Penggunaan Lahan dan Pola Perubahannya Serta Implikasinya Terhadap Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah"*. IPB 2000
3. Hasni. *"Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah"*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008
4. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah, PP Nomor 16 Tahun 2004.
5. Republik Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang,UU Nomor 26 Tahun 2007.
6. RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031
7. RTRW Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
8. Standar Nasional Indonesia (SNI), *"Penyusunan Neraca Sumber Daya - Bagian 3: Sumber Daya Lahan Spasial"*. SNI 19-6728.3-2002
9. Sudaryanto. *"Pemanfaatan Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan Berdasarkan Pedoman Baku di Kecamatan Umbulraharjo Kota Yogyakarta"*. 2014

LAMPIRAN

Pengusul kegiatan penelitian ini adalah dosen pada Program Studi Diploma III Teknik Survei dan Pemetaan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung yang terdiri atas :

1. Armijon, S.T., M.T.
2. Ir. Setyanto, M.T.
3. Ir. Margareta Welly, M.T

Organisasi Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama | : Armijon, S.T., M.T. |
| b. NIP | : 19730410 200801 1 008 |
| c. Pangkat/ Golongan | : Penata Muda/IIIb |
| d. Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli |
| e. Tempat/ Tgl. Lahir | : Padang Panjang/10 April 1973 |
| f. Unit Kerja | : Program Program Studi D3
Teknik Survei dan Pemetaan Jurusan Teknik
Sipil, FT-UNILA |
| g. Alamat Kantor | : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Lampung 35145 |
| h. Bidang Keahlian | : Teknik Geodesi |

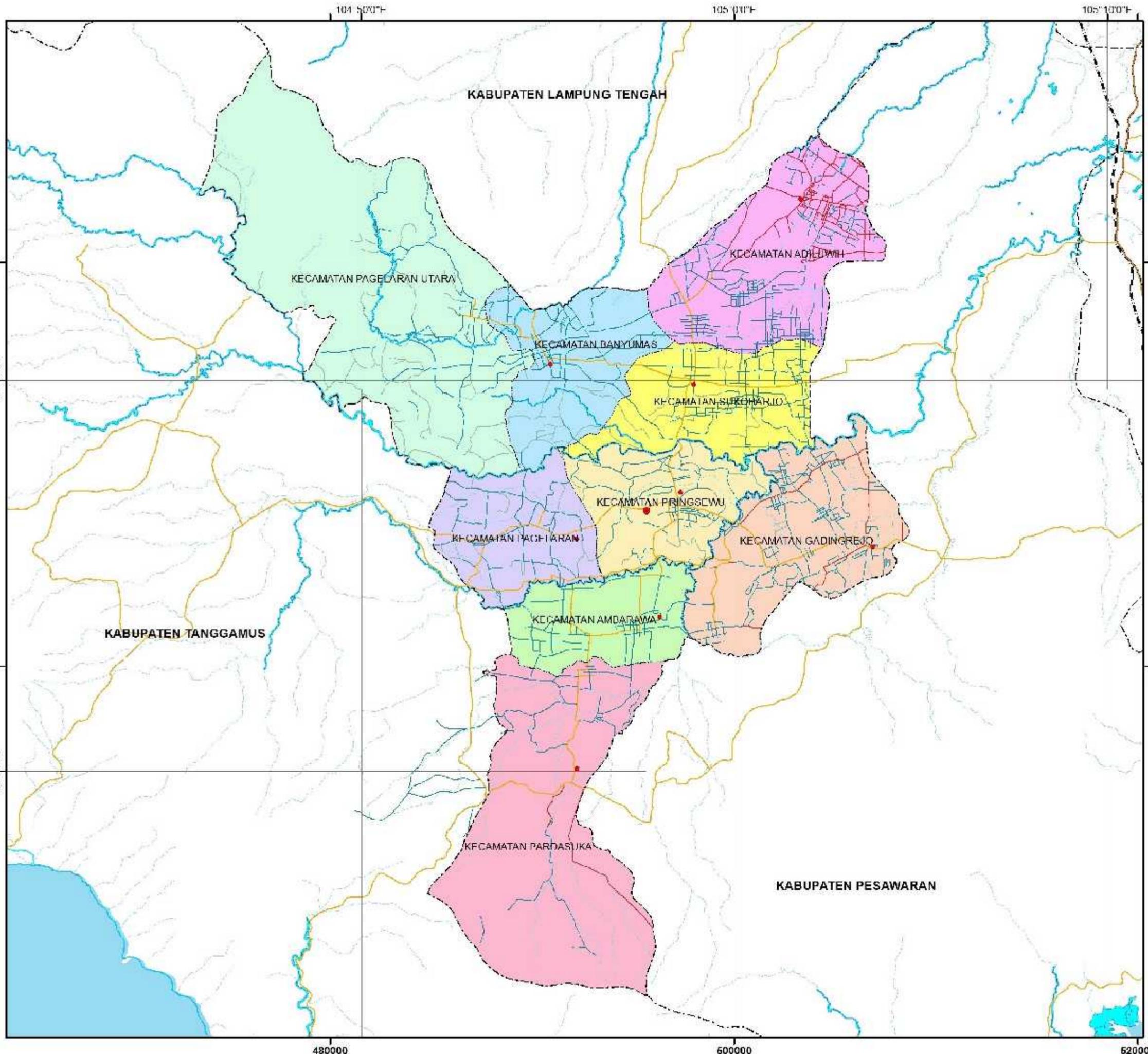
2. Anggota

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama | : Ir.Setyanto, MT. |
| b. NIP | : 195508301984031001 |
| c. Pangkat/ Golongan | : Pembina / IV a |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| e. Tempat/ Tgl. Lahir | : Purwodadi / 30 Agustus 1955 |
| f. Unit Kerja | : Program Studi S1 Teknik Geodesi
Jurusan Teknik Sipil, FT - UNILA |
| g. Alamat Kantor | : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Lampung 35145 |
| h. Bidang Keahlian | : Teknik Sipil |

3. Anggota Pelaksana

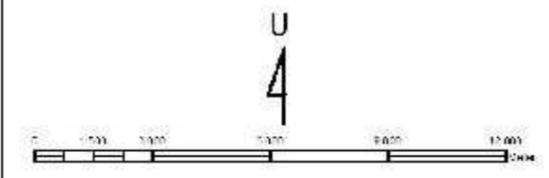
- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama | : Ir. Margareta Welly, M.T |
| b. NIP | : 195504021990032001 |
| c. Pangkat/ Golongan | : Penata/IIIc |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor |
| e. Tempat/ Tgl. Lahir | : 26 September 1953 |
| f. Unit Kerja | : Program Studi D3 Teknik Survei dan
Pemetaan Jurusan Teknik Sipil, FT-Unila |
| g. Alamat Kantor | : Jl. Soemantri Brojonegoro No.1. Lampung 35145 |
| h. Bidang Keahlian | : Teknik Sipil |

LAMPIRAN



**LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

Gambar:
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PRINGSEWU



LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- Jalan Kereta Api
- Sungai

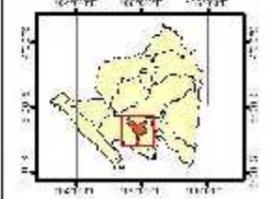
NAMA KECAMATAN

- Kecamatan Adiluwih
- Kecamatan Ambarawa
- Kecamatan Banyumas
- Kecamatan Gadingrejo
- Kecamatan Pagelaran
- Kecamatan Pagelaran Utara
- Kecamatan Pargasuka
- Kecamatan Pringsewu
- Kecamatan Sukoharjo

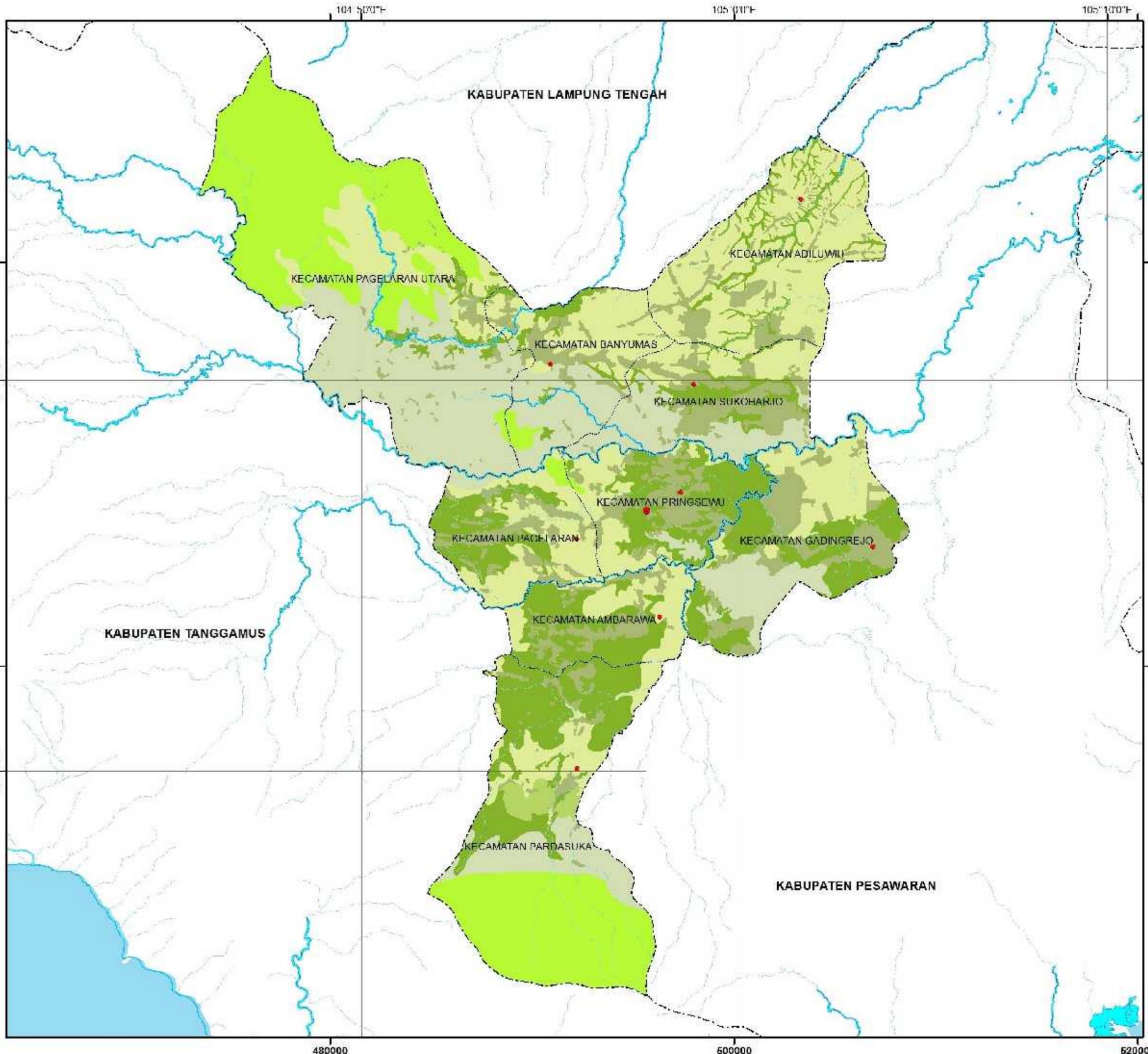
Oleh:

1. Armijan, S.T., M.T	NIP : 197304102008011008
2. r. Setyanto, S.T., M.T	NIP : 195508301984031001
3. Ir. Margareta Welly M.T	NIP : 195501021990032001

DIAGRAM LOKASI

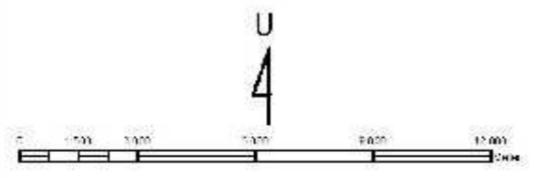


Prodi D3 Teknik Survey dan Pemetaan
Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik
Universitas Lampung
2017



LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU

Gambar
**PETA TUTUPAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**



LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- ~ Sungai

TUTUPAN LAHAN :

- BELUKAR
- HUTAN
- KEBUN
- PEMUKIMAN
- SAWAH
- Sungai, Air, Rawa
- TEGALAN

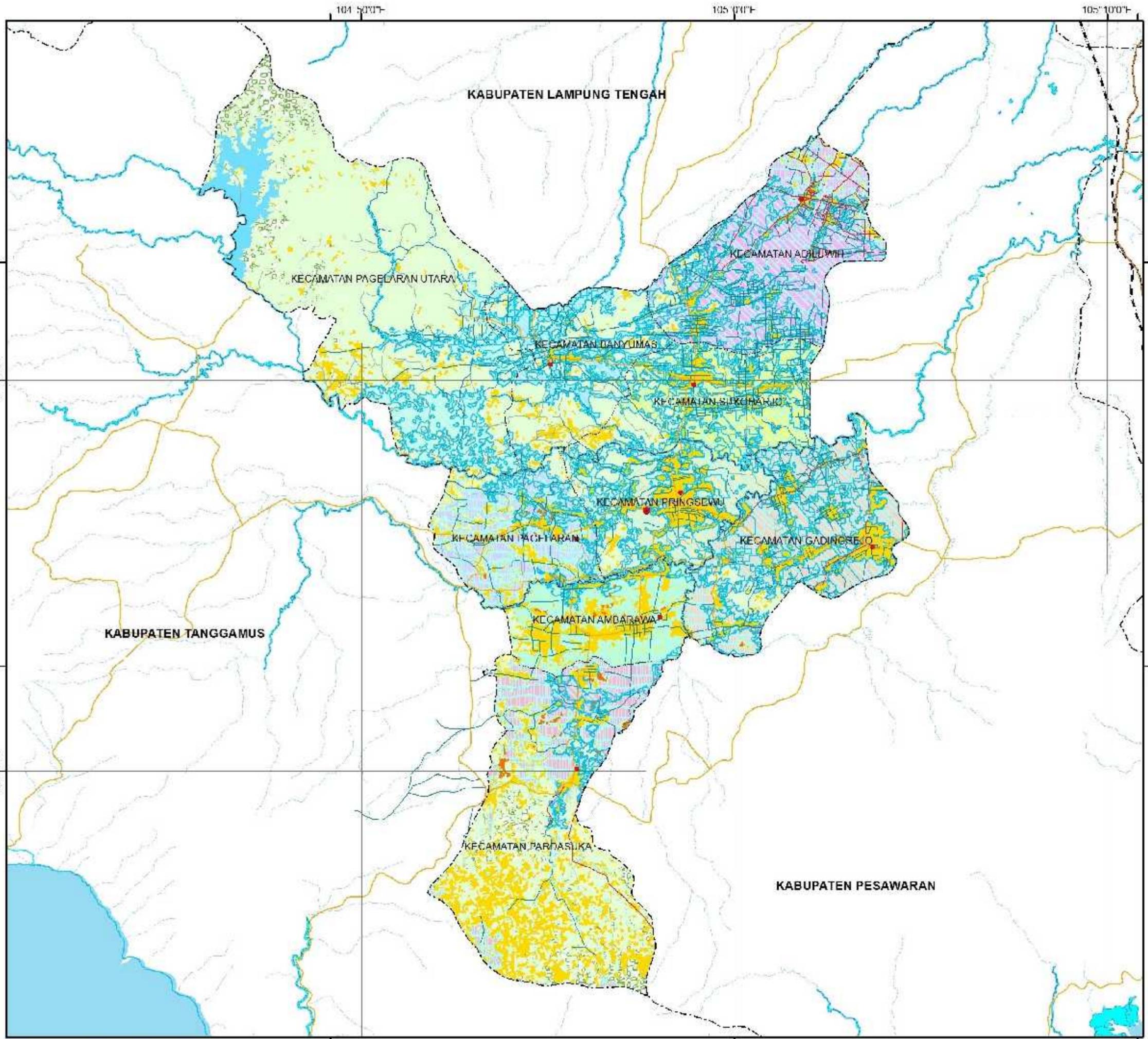
- Oleh:
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Armijon, S.T., M.T. | NIP : 197304102008011008 |
| 2. Ir. Setyanto, S.I., M.I. | NIP : 1955083011984031001 |
| 3. Ir. Margareta Welly, M.I. | NIP : 195504021990032001 |

DIAGRAM LOKASI



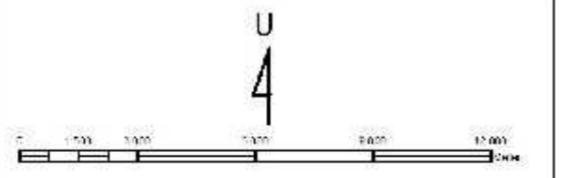
Profil:
 Jurusan: Geomatika
 Lokasi: Kampus 1
 Tahun: 2017
 Dosen Pembimbing: Dr. H. Fauzan Triana
 Universitas Lampung 2017





LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU

Gambar
**PETA PENGGUNAAN LAHAN EXISTING
KABUPATEN PRINGSEWU**

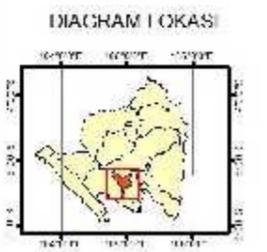


- LEGENDA**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - Jalan Setapak
 - Jalan Kereta Api
 - Sungai

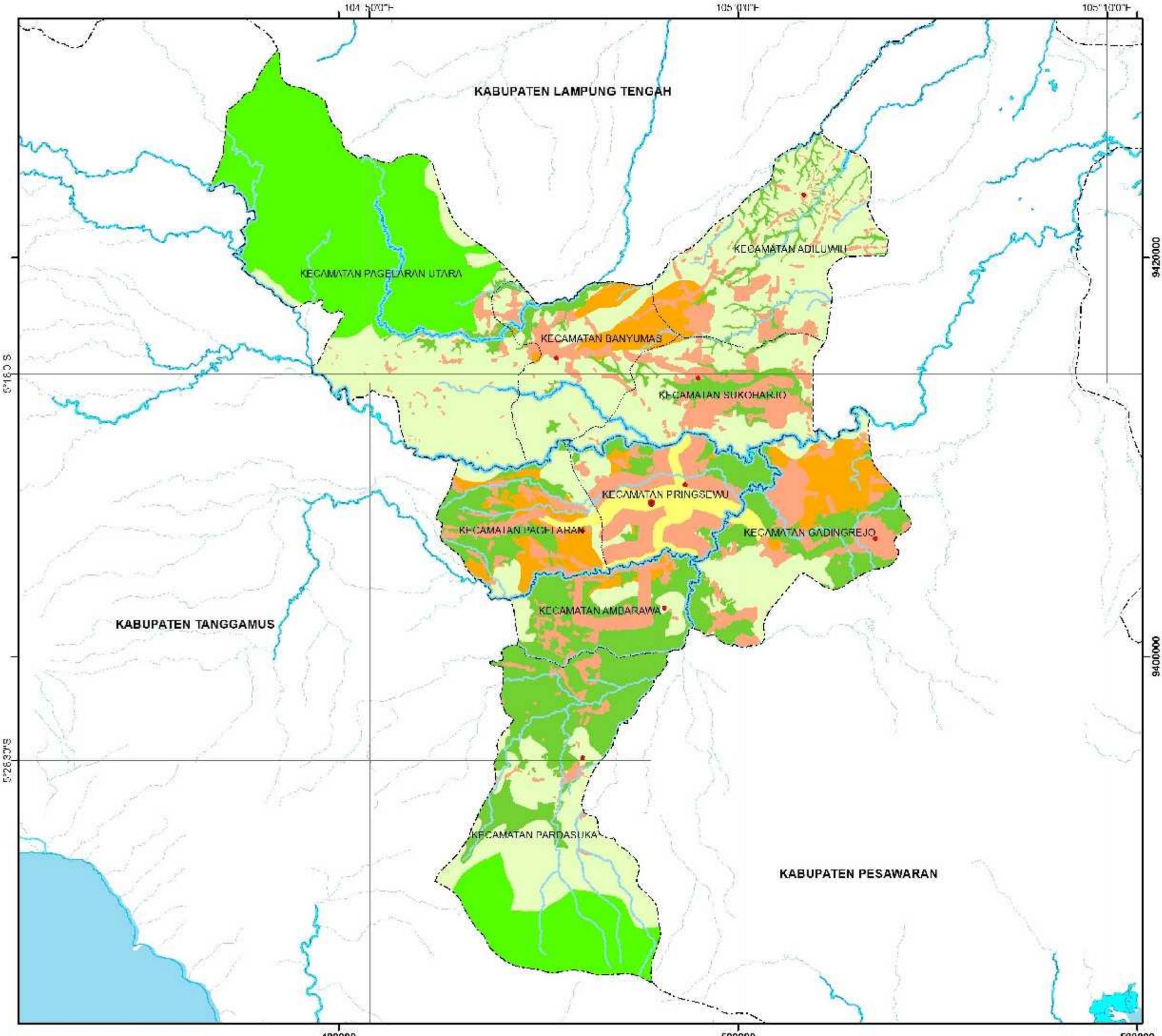
- PENGGUNAAN LAHAN EXISTING**
- Hutan Lahan Kering Sekunder
 - Hutan Rawan Sekunder
 - Industri
 - Lahan Terbuka
 - Perkebunan
 - Perumahan
 - Pertanian Lahan Basah
 - Pertanian Lahan Kering
 - Pertanian Lahan Kering Campur Semak
 - Savana
 - Sawah
 - Semak
 - Semak belukar
 - Terbuk
 - Tumbuhan Air

Oleh :

1. Armijon S.T., M.T	NIP : 19730410200011000
2. Ir. Setyanto S.T., M.T	NIP : 195508301984031001
3. Ir. Margareta Welly M.T	NIP : 195504071990032001

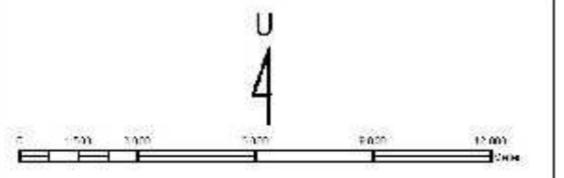


Profil
Sasaran : Universitas
Lokasi : Pringsewu
Dibuat oleh : DPN Fakultas Teknik
Universitas Lampung, 2017



**LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

Gambar: **PETA POLA RUANG
KABUPATEN PRINGSEWU**



- LEGENDA**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai

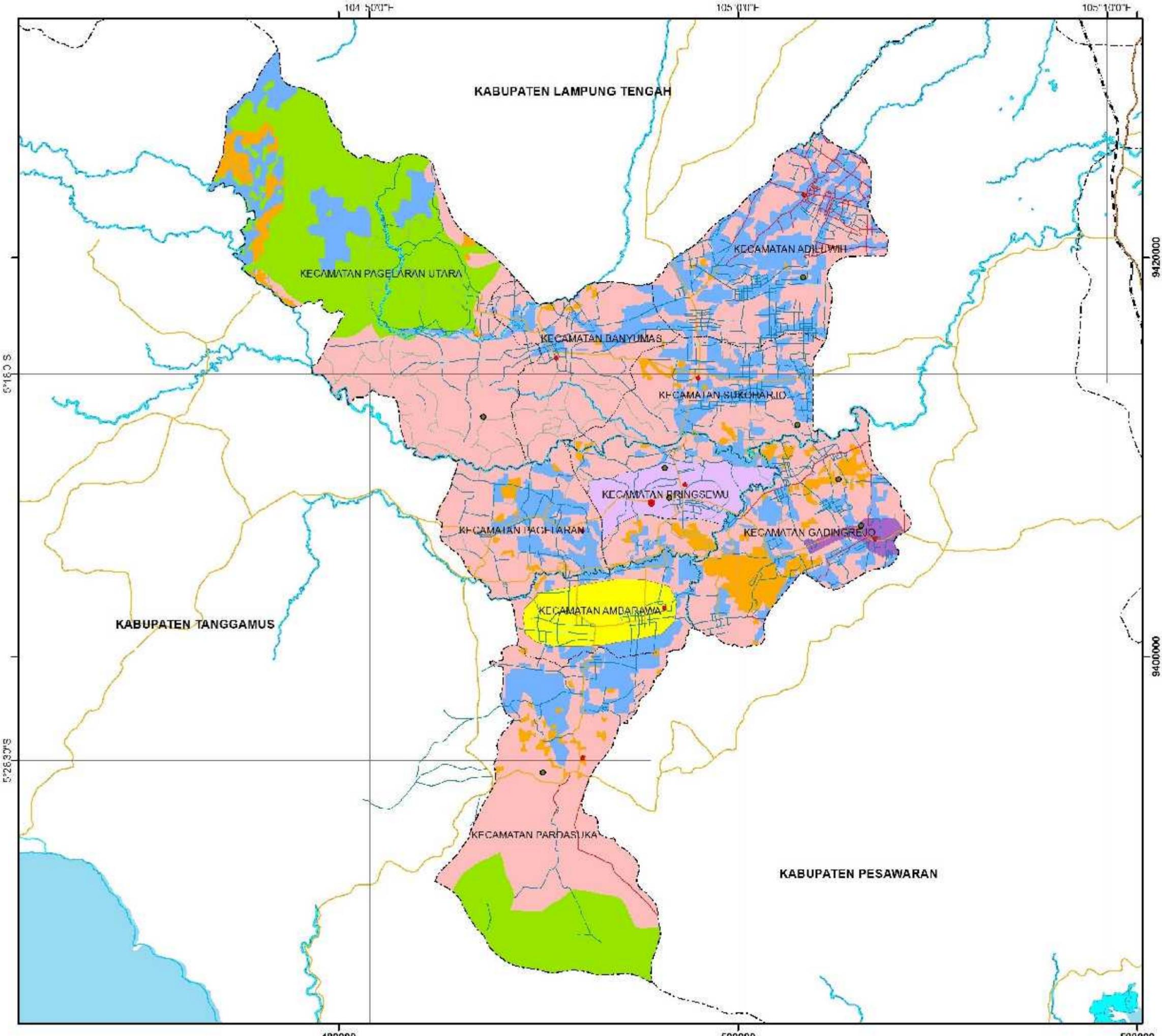
- RENCANA POLA RUANG :**
- Hutan Lindung
 - Kawasan Perdagangan & Jasa
 - Perkebunan
 - Permukiman
 - Pertanian Tanaman Hortikultura
 - Pertanian Tanaman Pangan
 - Sempadan Sungai

Oleh:

1. Anujon S.T., M.T	NIP : 197304102008011008
2. Ir. Setyanto S.T., M.T	NIP : 195508301984031001
3. Ir. Margareta Welly, M.T	NIP : 195504021990032001

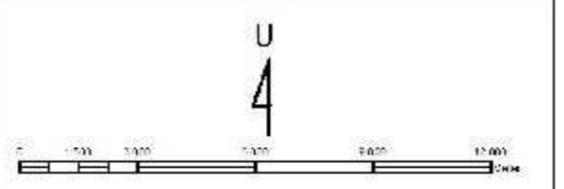


Profil:
 Jurusan: Geomatika
 Lokasi: Kampus 1
 Dosen Pembimbing: Dr. Ir. H. M. H. H. H.
 Dosen Pembimbing Lapangan: Dr. Ir. H. M. H. H. H.



**LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

Gambar
**PETA PENGEMBANGAN KAWASAN
BERDASARKAN KETERSEDIAAN TANAH**



LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Sepeda
- Jalan Kereta Api
- Sungai

KETERSEDIAAN LAHAN

- tersedia Bersyarat Kawasan Lindung
- tersedia Bersyarat Kawasan Budidaya
- tersedia Dalam Rangka Optimalisasi
- tersedia Dalam Rangka Penyesuaian

KAWASAN STRATEGIS

- Kawasan Perdagangan Regional
- Kawasan Pengembangan Pendidikan
- Kawasan Pemukiman Kepadatan Tinggi

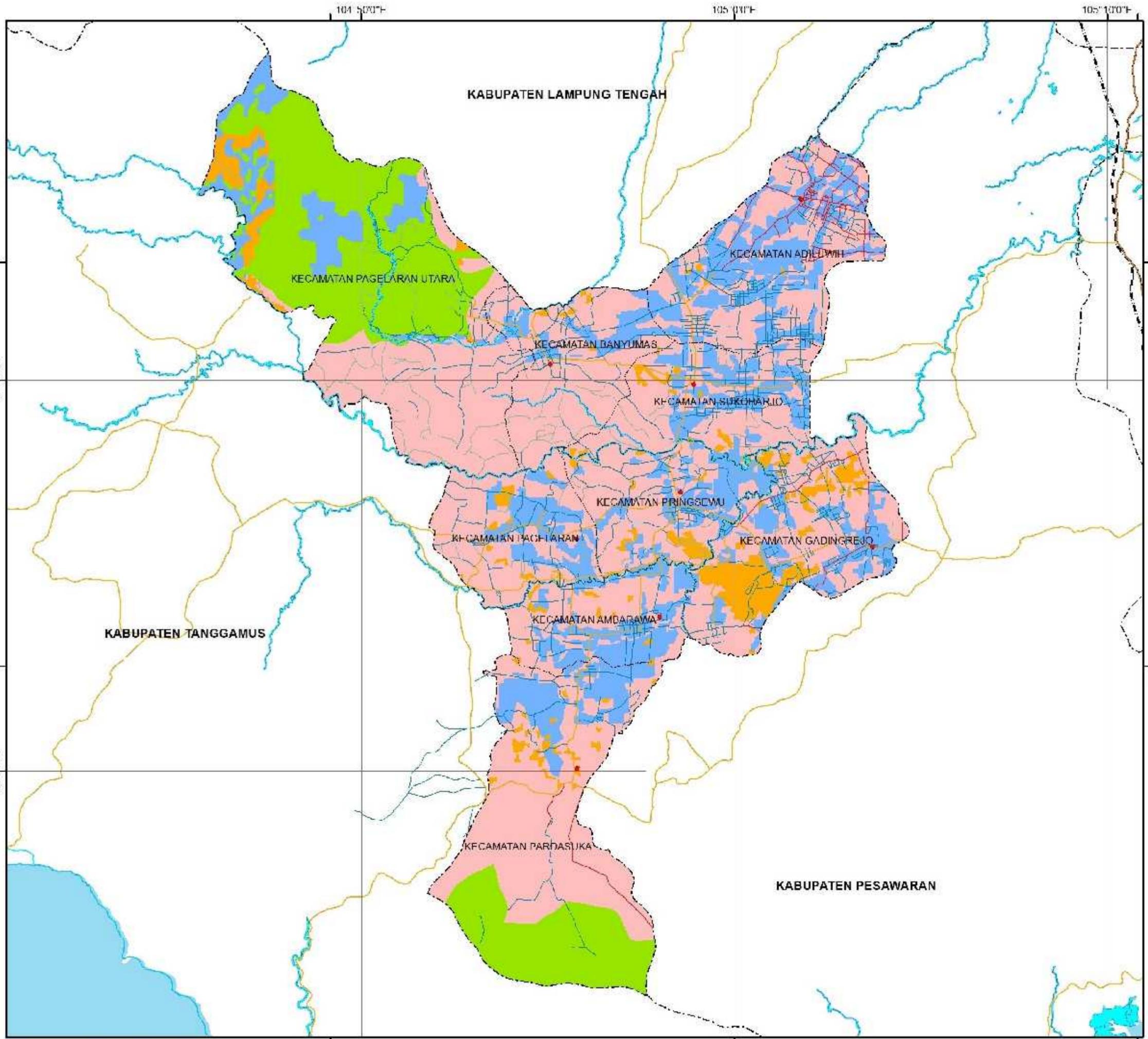
Oleh

1. Armijon, S.T., M.T	NIP : 197304102008011008
2. Ir. Setyanto S.I., M.I	NIP : 195508311984031001
3. Ir. Margareta Welly, M.T	NIP : 195504021990032001



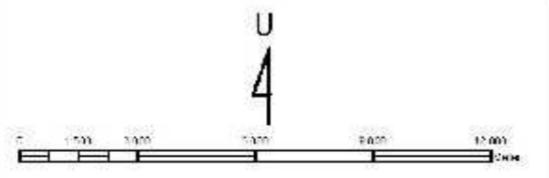
Profil
Sasaran dan
Lokasi Lokal
Dibuat oleh

Departemen Teknik
Geomatika dan
Survei
01934
DIP. Fakultas Teknik
Universitas Lampung 2017



LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN NERACA PENATAAGUNAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU

Gambar
**PETA KETERSEDIAAN LAHAN
KABUPATEN PRINGSEWU**



LEGENDA

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- Jalan Kereta Api
- Sungai

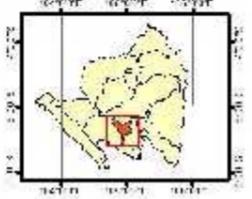
KETERSEDIAAN LAHAN

- Tersedia Bersyarat Kawasan Lindung
- Tersedia Bersyarat Kawasan Budidaya
- Tersedia Dalam Rangka Optimalisasi
- Tersedia Dalam Rangka Penyesuaian

Oleh

1. Armijon, S.T., M.T	NIP: 197304102008011008
2. Ir. Setyanti, S.T., M.T	NIP: 195508301984031901
3. Ir. Margareta Wolly, M.T	NIP: 195504021990032001

DIAGRAM LOKASI



Profil
Sasaran: Universitas Lampung
Lokasi: Pringsewu
Dibuat oleh: DPN Fakultas Teknik
Universitas Lampung 2017